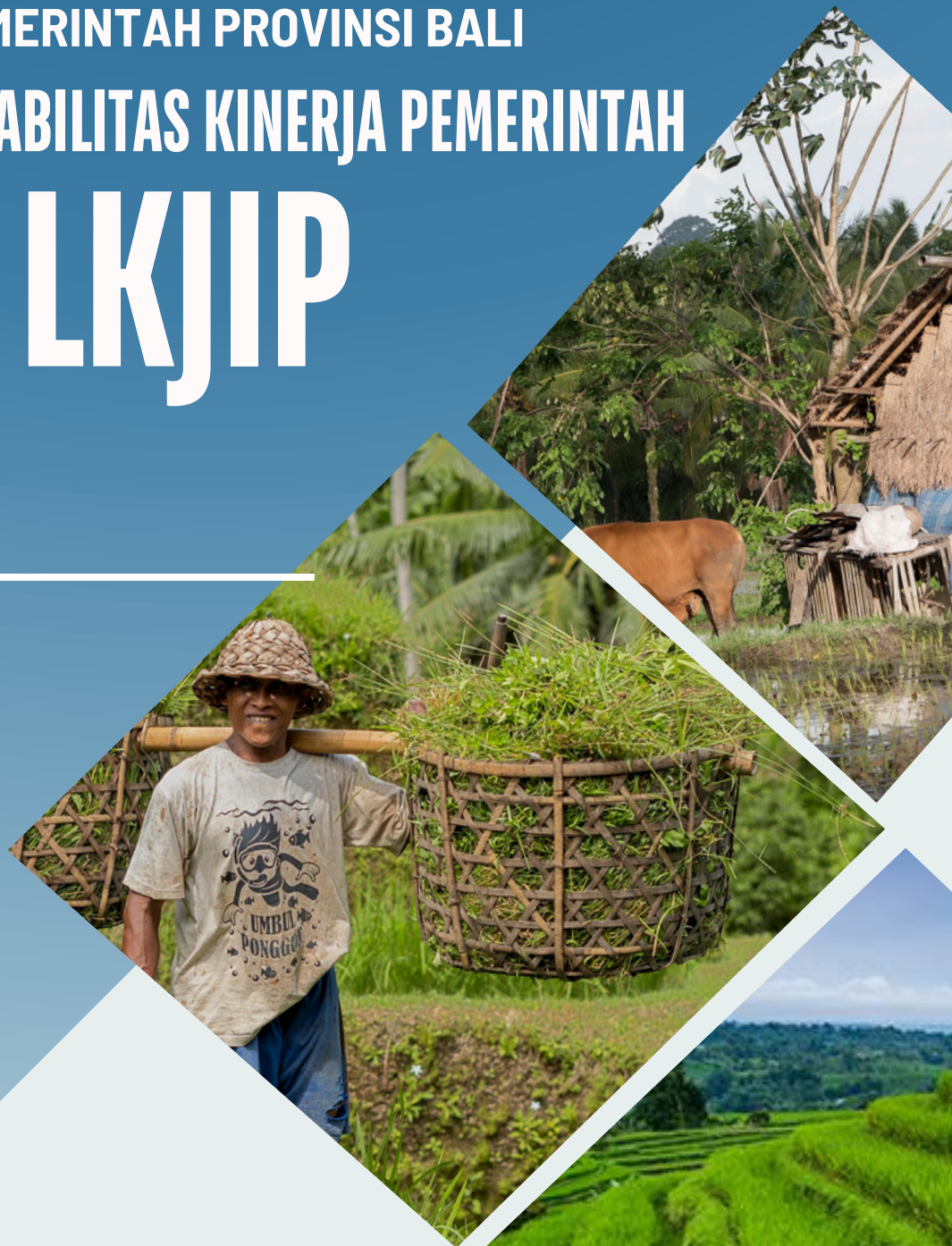




PEMERINTAH PROVINSI BALI

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

# LKJIP



DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN  
PANGAN PROVINSI BALI

# 2025



## KATA PENGANTAR



Angayubagia kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara NugrahaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025 ini merupakan amanat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana laporan ini sebagai salah satu media pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penggunaan anggaran berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2025 ini melaporkan tentang prosentase pencapaian Kinerja dalam mewujudkan Sasaran dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Bali, sekaligus sebagai bahan informasi bagi pemangku kepentingan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu memberi masukan dan saran dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terimakasih, semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Bali, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan  
Pangan Provinsi Bali



Dr. I Wayan Sunada, SP., M. Agb

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19671231198703 1 056

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali berkomitmen melakukan penyelarasan terkait penyusunan laporan kinerja mulai dari dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja, begitu pula dalam hal pengukuran kinerja yang akan menjadi langkah awal dalam menentukan arah kebijakan perangkat daerah untuk tahun berikutnya. Sebagai perwujudan komitmen tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali melakukan sejumlah langkah-langkah strategis dalam manajemen kinerja pada tahun 2025 yaitu *Pertama*, penyusunan perjanjian kinerja pada jenjang Eselon III dan Eselon IV dan pelaksana yang merupakan turunan dari Perjanjian Kinerja Eselon II dalam format *cascading* kinerja yang menggambarkan tautan kinerja antara Eselon II, III, dan IV dan pelaksana. *Kedua*, Implementasi e-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis elektronik).

Secara umum capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali pada tahun 2025 termasuk sangat baik dengan capaian kinerja pada sasaran kinerja meningkatnya ketersediaan pangan strategis sebesar 245,39% dan pada sasaran meningkatnya sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 122,48%, walaupun ada beberapa capaian program yang pencapaian belum optimal. Dari realisasi anggaran APBD mencapai 93,56% dengan realisasi fisik 96,95% dan realisasi APBN sebesar 67,04% dengan realisasi fisik 100,00%.

## DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Landasan Hukum.....	2
1.4 Gambaran Umum.....	4
1.5 Permasalahan dan Isu Strategis.....	10
1.6 Sistematika Penyusunan LKjIP.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
2.1 Rencana Strategis.....	16
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	24
2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025.....	26
2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.....	26
2.5 Instrumen Pendukung.....	27
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	28
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	30
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025 .....	118
BAB IV PENUTUP.....	143
4.1 Kesimpulan.....	143
4.2 Permasalahan dan Tindak Lanjut.....	144

Lampiran

## DAFTAR TABEL

	HAL	
Tabel 1	Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025.....	6
Tabel 2	Program dan Sumber Dana APBD TA.2025.....	9
Tabel 3	Program dan Sumber Dana APBN Tahun 2025.....	10
Tabel 4	Sasaran,Tujuan dan Indikator Kinerja Renstra 2024 – 2026....	16
Tabel 5	Tujuan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali 2025 – 2029.....	21
Tabel 6	Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali 2025 – 2029.....	22
Tabel 7	Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	25
Tabel 8	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025.....	26
Tabel 9	Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025.....	26
Tabel 10	Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	28
Tabel 11	Capaian Realisasi Tahun 2025.....	30
Tabel 12	Capaian Realisasi Tahun 2025 terhadap Realisasi Tahun 2024	37
Tabel 13	Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Kinerja (Akhir Renstra) untuk Semua Sasaran.....	40
Tabel 14	Data Ketersediaan Pangan Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat Tahun 2025.....	44
Tabel 15	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Menurut Provinsi Tahun 2025.....	49
Tabel 16	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Jagung Menurut Provinsi Tahun 2025.....	51
Tabel 17	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Bawang Merah, Bawang Putih, Cabe Rawit, Cabe Besar Menurut Provinsi Tahun 2024.....	53

	HAL
Tabel 18 Data produksi Daging Sapi, Daging Ayam dan Telur.....	57
Tabel 19 Realisasi Eksport Produk Pertanian Tahun 2025.....	60
Tabel 20 Analisis Keberhasilan/Kegagalan dalam pencapaian Tahun 2025.....	61
Tabel 21 Data Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan...	66
Tabel 22 Data Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.....	77
Tabel 23 Realisasi Indeks Penanaman (IP) Tahun 2025.....	86
Tabel 24 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan.....	88
Tabel 25 Realisasi Fisik dan Keuangan Dana APBD Tahun 2025.....	119
Tabel 26 Realisasi Fisik dan Keuangan Dana APBN Tahun 2025.....	136

## DAFTAR GAMBAR

	HAL
Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.....	5

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Pengukuran kinerja ini dilakukan terhadap kegiatan tahun anggaran 2025 dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek *input*, *output*, *outcome*, *benefit* maupun *impact*. Selain itu pengukuran kinerja juga dilakukan terhadap sasaran strategis dengan mengukur pencapaian indikator sasaran yang telah ditargetkan dibandingkan dengan realisasinya.

Dengan disusunnya LKjIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025 diharapkan dapat :

1. Memberikan gambaran yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan terkait capaian program dan kegiatan sekaligus sebagai sarana evaluasi terhadap capaian kinerja yang

telah di tetapkan.

2. Menjadi masukan dan umpan balik bagi instansi lain maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali didalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dan sebagai bukti akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali kepada publik atas penggunaan sumber daya dan penggunaan anggaran dalam rentang waktu satu tahun. Adapun tujuannya adalah sebagai laporan pertanggung jawaban dan sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun mendatang.

## **1.3 Landasan Hukum**

Dasar Hukum dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
6. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bali;
7. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

## **1.4 Gambaran Umum**

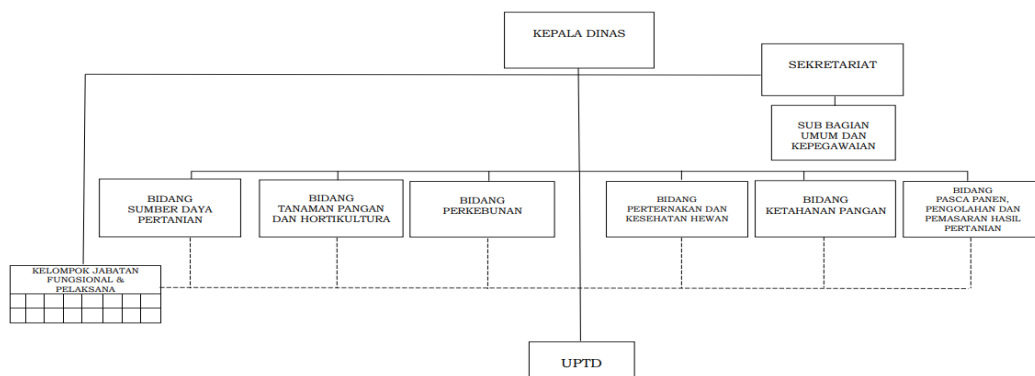
### **1.4.1 Struktur Organisasi**

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bali (sesuai gambar 1) terdiri atas seorang Kepala Dinas dibantu oleh :

1. Sekretariat
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Sumber Daya Pertanian
3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
4. Bidang Perkebunan
5. Bidang Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
7. Bidang Ketahanan Pangan
8. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
9. UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

10. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
11. UPTD Balai Inseminasi Buatan Daerah, Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
12. UPTD Balai Sertifikasi Mutu Keamanan Pangan
13. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1 : Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali



Sumber : Lampiran Pergub Bali Nomor 9 Tahun 2025

#### 1.4.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Provinsi serta melaksanakan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali mempunyai fungsi:

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian dan bidang pangan;
- c) penyelenggaraan administrasi Dinas bidang pertanian dan bidang pangan;
- d) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

**a. Keadaan Pegawai**

Jumlah pegawai pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 seluruhnya adalah sebanyak 606 orang terdiri dari 200 orang pegawai PNS, 2 orang pegawai CPNS, 314 orang PPPK dan 90 orang pegawai Non ASN/Tenaga Kontrak. Rincian sebaran pegawai pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali sebagaimana pada tabel 1.

Tabel 1 : Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH PEGAWAI ASN</b>	<b>JUMLAH PEGAWAI NON ASN</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	1 Orang	-	1 Orang
2	SEKRETARIAT	52 Orang	31 Orang	83 Orang
3	BIDANG SUMBER DAYA PANGAN	18 Orang	0 Orang	18 Orang
4	BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	26 Orang	1 Orang	27 Orang
5	BIDANG PERKEBUNAN	72 Orang	1 Orang	73 Orang

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH PEGAWAI ASN</b>	<b>JUMLAH PEGAWAI NON ASN</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
6	BIDANG KETAHANAN PANGAN	29 Orang	1 Orang	30 Orang
7	BIDANG PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN	27 Orang	1 Orang	28 Orang
8	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	24 Orang	4 Orang	28 Orang
9	UPTD. BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	63 Orang	8 Orang	71 Orang
10	UPTD. BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	41 Orang	4 Orang	45 Orang
11	UPTD. BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	71 Orang	13 Orang	84 Orang
12	UPTD. BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK	45 Orang	18 Orang	63 Orang
13	UPTD. BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	37 Orang	8 Orang	45 Orang
	<b>TOTAL</b>	<b>516 Orang</b>	<b>90 Orang</b>	<b>606 Orang</b>

*Sumber : Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Desember 2025*

#### **b. Keadaan Sarana dan Prasarana**

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dengan 5 (lima) UPTD masing-masing memiliki gedung kantor, sarana transportasi, sarana perkantoran yang memadai.

Fasilitas yang tersedia pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari adalah sebagai berikut :

1. Gedung Kantor Utama pada lantai 1 yang ditempati oleh Sekretariat, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Sumber Daya Pertanian, sedangkan pada lantai 2 di tempati oleh Bidang Perkebunan, Bidang Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dan pada lantai 3 di tempati oleh Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Bidang Ketahanan Pangan, Setiap lantai dilengkapi dengan :
  - a. Fasilitas AC
  - b. Alat deteksi kebakaran (*fire alarm*)
  - c. CCTV
  - d. Ruang rapat : 6 ruangan
  - e. Ruang tunggu
  - f. Kamar kecil/ toilet
2. Tempat parkir kendaraan bermotor berupa gedung parkir untuk parkir mobil, sepeda motor pegawai dan tamu di halaman tengah cukup luas.
3. Gedung Kantor UPTD BSMKP :
  - a. Fasilitas AC
  - b. Alat deteksi kebakaran (*fire alarm*)
  - c. Kamar Kecil/Toilet
4. Posko Rabies :
  - a. Lantai 1
  - b. Kamar kecil/toilet
5. Bangunan Mess dengan 5 (lima) kamar tidur
6. Wantilan
7. Tempat parkir traktor
8. Daya Listrik 82.500 VA

9. Telekomunikasi/Jaringan Telepon Kabel : Telp. 228716 dan 247645 dan jaringan internet
10. Sarana angkutan kendaraan dinas.
11. Peralatan kerja berupa : meja, kursi, komputer, printer, rak, almari.
12. Di UPTD BBITPHBUN, BPTPHBUN, BPSBTPHBUN, BIBD PTHPT :
  - a. Gedung Kantor & Laboratorium
  - b. Lahan Sawah & Kebun
  - c. Sarana angkutan, peralatan kerja, peralatan lab dll. cukup memadai.

**c. Keuangan**

Untuk mendukung capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali pada Tahun 2025 mendapat anggaran yang bersumber dari dana APBD dan APBN (Dana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2 : Program dan Sumber Dana APBD TA 2025

No	PROGRAM	PAGU (Rp)
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	59.877.327.360
2	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian	35.496.475.195
3	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.617.709.142
4	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.554.210.222
5	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	9.312.187.885
6	Program Penanganan Kerawanan Pangan	1.124.436.042
7	Program Pengawasan Keamanan Pangan	443.390.821
8	Program Pengendalian dan Penaggualangan Bencana Pertanian	848.586.526
9	Program Penyuluhan Pertanian	128.280.515
<b>Jumlah</b>		<b>110.402.603.708</b>

Sumber : Data Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025

Tabel 3 : Program dan Sumber Dana APBN TA 2025

<b>NO</b>	<b>NAMA PROGRAM</b>	<b>PAGU (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Program Dukungan Manajemen	1.055.261.000	Satker Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	Program Ketersediaan Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Program Dukungan Manajemen	284.750.000	Satker Tanaman Pangan
3	Program Ketersediaan Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Program Dukungan Manajemen	1.629.270.000	Satker Prasarana dan Sarana Pertanian
4	Program Pendidikan dan Pelatihan vokasi	139.334.000	Satker Penyuluhan
5	Program Ketersediaan Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Program Dukungan Manajemen	1.631.383.000	Satker Ketahanan Pangan

Sumber : Data Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025

## **1.5 Permasalahan dan Isu Strategis.**

### **1.5.1 Permasalahan**

Berdasarkan hasil identifikasi, permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Bali adalah sebagai berikut :

#### **A. Subsistem Hulu**

##### a) Lahan Pertanian

Alih fungsi lahan pertanian produktif.

Luas lahan sawah cenderung berkurang setiap tahun karena beralih fungsi ke non pertanian. Data lima tahun

terakhir terjadi alih fungsi lahan seluas 8.004,78 Ha atau rata – rata 1.339,13 Ha (1,75%).

b) Pengusahaan lahan.

Kebanyakan petani di Bali (54,81%) mengusahakan lahan sawah dibawah 0,50 ha dan cenderung berkurang karena adanya proses fragmentasi lahan sebagai akibat dari sistem/pola warisan.

c) Pemanfaatan lahan belum optimal

Banyaknya lahan yang tidak dimanfaatkan secara optimal.

d) Kesuburan lahan menurun

Kesuburan lahan terutama kandungan bahan organik cenderung menurun.

e) Ketersediaan air irigasi berkurang (terutama pada musim kemarau). Disamping itu juga terjadi kompetisi pemanfaatan sumber daya air antara petani dan non petani (rumah tangga dan bisnis).

f) Sarana dan prasarana :

- Terbatasnya ketersediaan Alsin di lapangan khususnya alat pengolahan tanah dan alat panen.
- Belum optimalnya penyediaan dan distribusi pupuk bersubsidi.
- Masih adanya peredaran pupuk dan pestisida illegal.
- Pemakaian benih bermutu, utamanya palawija belum optimal.

g) Permodalan petani terbatas.

Terbatasnya kemampuan petani untuk membiayai usahatannya menyebabkan tingkat penerapan teknologi belum optimal sehingga produktivitas yang dicapai masih dibawah produktivitas potensial.

## **B. Subsistem Budaya**

- a) Adopsi teknologi belum sesuai harapan.
- b) Perubahan iklim yang tidak menentu.
- c) Serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) muncul setiap musim tanam.

## **C. Subsistem Hilir**

- a) Mutu dan keamanan pangan belum sepenuhnya dapat memenuhi tuntutan konsumen dan standar yang ditetapkan
- b) Fluktuasi harga.  
Harga hasil pertanian berfluktuasi cukup tajam yakni sangat rendah terutama pada saat panen raya.
- c) Lemahnya Akses petani terhadap informasi dan pasar  
Petani lemah dalam mengakses informasi dan pasar, sehingga perencanaan produksi kurang didasarkan atas peluang pasar.

## **D. Subsistem Penunjang**

- a) Belum lengkapnya standart operasi prosedur.
- b) Kelembagaan petani belum optimal. Sebagian kelembagaan petani belum berperan secara optimal, terutama dalam aspek ekonomis.
- c) Kualitas SDM petani dan Penyuluh relatif masih rendah
- d) Kelembagaan penyuluhan belum optimal akibat beragamnya pola dan sistem antar Kab/Kota.

## **E. Isu Startegis**

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, maka perlu dilakukan identifikasi terhadap isu-isu strategis yang berkembang untuk mendapatkan perhatian dan upaya pemecahan. Secara umum isu strategis dalam

pembangunan pertanian dan ketahanan pangan di Provinsi Bali antara lain:

1. Pemenuhan kebutuhan pangan, terutama pangan pokok, mengakibatkan Komoditi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Ketahanan Pangan dapat menyebabkan terjadinya kenaikan inflasi. Isu Pemenuhan kebutuhan pangan meliputi penyediaan pangan (produksi pangan) dan diversifikasi konsumsi pangan yang belum berimbang.
2. Konflik kepentingan pemanfaatan sumber daya air, disebabkan menurunnya potensi sumber daya air dan meningkatnya persaingan pemanfaatan sumber daya air untuk pertanian dan rumah tangga serta bisnis.
3. Kualitas dan daya saing hasil pertanian yang belum optimal sehingga perlunya perbaikan kualitas serta keamanan produk disamping itu berkembangnya trend pola hidup “back to nature” yang menuntut produk ramah lingkungan atau produk organik.
4. Meningkatnya alih fungsi lahan dan menurunnya tingkat kesuburan lahan.
5. Petani dominan berusia lanjut dan kurangnya minat generasi muda berusahatani. serta pendapatan petani relatif rendah.
6. Penyuluh yang ada kebanyakan merupakan tenaga kontrak perlu mendapatkan pendidikan secara berkala.
7. Dampak perubahan Iklim terhadap intensitas serangan OPT.
8. Akses pemasaran dan dampak pasar bebas.

## **F. Tantangan dan Peluang**

Tantangan global pemasaran produk pertanian ke depan akan dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis baik domestik maupun internasional yang dinamis sehingga menuntut produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan mampu berdaya saing dalam pasar global. Untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian maka dibutuhkan efisiensi dalam sistem produksi, pengolahan dan pengendalian mutu serta kesinambungan produk. Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan sampai saat ini masih banyak persoalan mendasar dan merupakan tantangan yang harus dipecahkan dengan penanganan yang cermat dan tepat seperti : (1) meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global, (2) terbatasnya ketersediaan infrastruktur, (3) sarana prasarana, lahan dan air, (4) kecilnya status dan luas kepemilikan lahan, (5) alih fungsi lahan, (6) belum optimalnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional, (6) terbatasnya akses petani terhadap permodalan, (7) lemahnya kapasitas kelembagaan petani, (8) rawannya ketahanan pangan dan energi, (9) belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik dan (10) masih rendahnya nilai tukar petani (NTP). Walaupun banyaknya tantangan yang harus dihadapi, tentu masih ada peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan. Dengan keberhasilan ekonomi yang saat ini tengah giat dijalankan, maka pendapatan per kapita penduduk juga akan meningkat. Peningkatan pendapatan disatu sisi, maka dapat terjadi peningkatan permintaan produk, termasuk di sektor pertanian Ini berarti ada pasar domestik yang luas yang

disamping jumlahnya meningkat, juga membutuhkan keragaman produk yang bervariasi, sehingga akan membuka peluang yang lebih besar terhadap diversifikasi produk. Sejalan dengan era globalisasi dan pemberlakuan pasar bebas, produk pertanian juga berpeluang besar untuk dipasarkan ke pasar international, baik produk segar maupun olahan.

## **1.6 Sistematika Penyusunan LKjIP**

- a) Bab.I Pendahuluan, penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi
- b) Bab.II Diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025.
- c) Bab.III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dengan terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2025, Tahun sebelumnya dan perbandingan lainnya.
- d) Bab.IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis**

##### **a) Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih**

Mengacu pada Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 bahwa Pemerintah Provinsi Bali fokus pada Pembangunan Ekonomi Kerthi Bali yang memiliki 6 (enam) sektor unggulan sebagai pilar perekonomian Bali, yaitu: 1) sektor Pertanian dalam arti luas termasuk Peternakan dan Perkebunan, 2) Sektor Kelautan dan Perikanan, 3) Sektor Industri, 4) Sektor Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi, 5) Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital, dan 6) Sektor Pariwisata. Dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dirumuskan 7 tujuan dengan 8 indikator tujuan, 24 sasaran dengan 28 indikator sasaran serta 69 program prioritas daerah dengan 90 indikator outcome yang ditargetkan. Untuk mencapai target sasaran yang telah dirumuskan setiap tahunnya, maka disusunlah tema/fokus pembangunan tahunan yang dimulai dari tahun 2024 ini yaitu Percepatan transformasi ekonomi kerthi Bali yang hijau, tangguh dan sejahtera serta peningkatan daya saing daerah

Mengacu pada RPD 2024 – 2026 yang kemudian di harmonisasi dengan RPJMD 2025 - 2029 sesuai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Provinsi Bali terpilih yaitu :



### **"Nangun Sat Kerthi Loka Bali"**

Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali era Baru

Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali mendukung misi ke 12 yaitu "Terwujudnya Ketahanan Pangan Krama Bali dengan peningkatan pertanian dan perikanan serta terpenuhinya kebutuhan sandang, papan kehidupan krama Bali". Dengan mengampu Tujuan 3 : Meningkatkan Laju dan Ketahanan Perekonomian Bali Berbasis Ekonomi Kerthi Bali dan sasaran 1 : Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Bali dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan Dengan 2 Sasaran yaitu: Sasaran 1 : Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Bali dengan indikator indeks ketahanan pangan.

#### **b) Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 tentang rencana strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020 - 2024 bahwa visi Kementerian Pertanian jangka menengah Tahun 2020 - 2025 adalah **"pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang daulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"**. Kementerian Pertanian mendukung

terwujudnya struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Telaahan terhadap Renstra Kementrian dan Renstra Daerah diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali. Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tetap memegang peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis pertanian dan ketahanan pangan tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui penguatan permodalan, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio-energi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, dan sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan (pertanian organik). dengan penekanan pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya, penilaian keserasian, keterpaduan, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali.

### 2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 maka disusunlah rencana strategis arah dan kebijakan perangkat daerah yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Dalam rencana strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 turut berperan dan memberikan kontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian Tujuan 1 (T1) yaitu : menurunkan tingkat kemiskinan krama Bali dengan sasaran 1 (S1.1) yaitu: meningkatnya perekonomian Krama Bali dan sasaran 4 (S1.4) yaitu terwujudnya stabilitas.

Tabel 4 : Sasaran, Tujuan dan Indikator Kinerja Renstra 2024 – 2026 sesuai RPD 2024 -2026

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN KE			KONDISI AKHIR	
					2024	2025	2026		
<b>Tujuan 1</b>	<b>T1</b>	<b>Menurunnya Tingkat Kemiskinan Krama Bali</b>							
Indikator Tujuan	:	Angka Kemiskinan		Persen	4,72	4,07	4,06	3,97	3,97
Sasaran Pemerintah Daerah	S1.1	Meningkatnya perekonomian Krama Bali	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-2,47	5,75	5,75	5,85	5,85
Sasaran Perangkat Daerah		Meningkatnya Sektor Pertanian Terhadap PDRB	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	10,61	10,62	10,63	10,64	10,65
Sasaran Pemerintah Daerah	S1.4	Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok	Angka inflasi	Persen	2,07	3±1	3±1	3±1	3±1
Sasaran Perangkat Daerah		Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis	Persentase ketersediaan pangan strategis	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Data Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025

Dan sebagai penyelarasan atas tujuan dan sasaran pada RPD 2024 – 2026 ke Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2029 maka disusunlah rencana strategis arah dan kebijakan perangkat daerah yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2025-2029. Penyusunan Tujuan dan sasaran pembangunan sektor Pertanian dan Pangan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Visi : **“Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru”** yang bermakna; Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Niskala – Sakala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945. Dalam Memantapkan dan mempercepat pewujudan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, dalam Bali Era Baru dilaksanakan melalui 22 (dua puluh dua) Misi dimana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali mendukung pencapaian Misi 12 yaitu Mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan sandang-papan bagi kehidupan Krama Bali dan 6 Bidang Prioritas Pembangunan yaitu :

- Bidang 1 : Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya serta Kearifan Lokal
- Bidang 2 : Kesehatan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
- Bidang 3 : Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital, dan Pariwisata.
- Bidang 4 : Infrastruktur Darat, Laut, dan Udara serta Transportasi
- Bidang 5 : Lingkungan, Kehutanan, dan Energi
- Bidang 6 : Bali Pulau Digital dan Keamanan Bali.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali mendukung pencapaian Bidang 3 yaitu Ekonomi Kerthi Bali; Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Perindustrian dan Perdagangan, UMKM dan Koperasi, Ekonomi Kreatif dan Digital, dan Pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 : Tujuan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2025 - 2029

MISI RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TUJUAN OPD
Misi 12 : Mewujudkan kedaulatan pangan, meningkatkan nilai tambah, daya saing pertanian, dan Meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan sandang-papan bagi kehidupan Krama Bali.	Meningkatnya Laju dan Ketahanan Perekonomian Bali Berbasis Ekonomi	Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat Bali	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya ketahanan pangan berkelanjutan dan kesejahteraan petani

Sumber : Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2025 - 2029

Sasaran adalah rumusan kondisi menggambarkan tercapainya tujuan dalam bentuk hasil pembangunan organisasi Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Dalam rangka mewujudkan Tujuan Dinas pertanian dan

Ketahanan Pangan Provinsi Bali di rumuskanlah sasaran strategis jangka menengah beserta Indikator Kinerja dan Target Kinerja.

Tabel 6 : Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali 2025 – 2029.

NSPK DAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya ketahanan pangan Krama Bali dengan peningkatan pertanian dan perikanan	Meningkatnya ketahanan pangan berkelanjutan dan kesejahteraan petani	Meningkatnya ketersediaan pangan strategis	Persentase ketersediaan pangan strategis	100	100	100	100	100
		Meningkatnya nilai produk olahan pertanian	Persentase Nilai Tambah Produk Pertanian (NTPP)	81,00	81,50	82,00	82,50	83,00

Sumber : Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2025 - 2029

### 2.1.2 Strategi

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan baik pada RPD 2024 -2026 maka Pemerintah Provinsi Bali juga menetapkan strategi serta arah kebijakan dalam pencapaian tujuan tersebut serta diharmonisasi pada RPJMD 2025 -2029 yang Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, strategi pembangunan daerah merupakan langkah-langkah komprehensif yang dirancang untuk mencapai tujuan pembangunan jangka menengah. Strategi ini berfungsi sebagai panduan dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan, mengoptimalkan potensi daerah, serta meningkatkan daya saing Provinsi Bali dalam konteks pembangunan pertanian di Provinsi Bali, pada Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2024 – 2026 telah di tetapkan beberapa strategi dalam pencapaian

sasaran dan tujuan strategis, adapun strategis tersebut :

1. Mengembangkan produk unggulan dalam negeri dan peningkatan pemasaran.
2. Peningkatan hasil dan nilai produk pertanian

Pada Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2024 - 2026 yang mana telah di sinergikan dan telah dilakukan penyesuaian dengan Renstra tahun 2025 – 2029 maka ditetapkan strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas/kwantitas hasil pertanian Krama Bali;
2. Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi;
3. Meningkatnya kapasitas SDM pertanian Krama Bali;
4. Meningkatnya ketahanan pangan bagi Krama Bali;
5. Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan.

### **2.1.3 Kebijakan**

Arah kebijakan pembangunan merupakan pedoman strategis yang digunakan untuk mengarahkan pelaksanaan program pembangunan agar sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPD 2024 – 2026 dan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025 – 2029. Maka arah kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh perangkat daerah, pemangku kepentingan, serta masyarakat memiliki panduan yang jelas dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Pada arah kebijakan sesuai Renstra 2024 - 2026 antara lain :

1. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produk unggulan lokal “ Branding Bali “ serta memperluas pemasaran mendukung transformasi ekonomi kerthi bali

2. Mendorong peningkatan kapasitas dan penerapan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.

Sedangkan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Menuntaskan sistem pertanian organik/ pertanian ramah lingkungan;
2. Meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian;
3. Mengendalikan alih fungsi lahan produktif dan melarang alih fungsi lahan sawah;
4. Mempercepat hilirisasi hasil pertanian;
5. Memberdayakan lahan tidak produktif/lahan tidur menjadi lahan produktif sesuai potensi alam dengan menerapkan teknologi tepat guna.

## **2.2 IKU (Indikator Kinerja Utama) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai Renstra 2024 - 2026**

IKU (Indikator Kinerja Utama) merupakan ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

Tabel 7 : Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Kinerja Utama Atau Tujuan/ Sasaran Strategi/Hasil (Outcome)	Indikator Kinerja Utama	Definisi	Metode/ Formula Perhitungan	Penanggung jawab	Sumber Data	Ket
1	2	3	4	5	9	10	11
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan startegis	Persentase ketersediaan pangan strategis	<p>Sesuai dengan UU No.18/2012 tentang Pangan maka ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.</p> <p>Pangan strategis meliputi 10 komoditas antara lain : beras, daging babi, daging sapi, daging ayam, telur ayam, cabai besar/merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih dan jagung</p>	<p>ketersediaan = (produksi + stok+ impor) - ekspor, kebutuhan = Konsumsi Rumah Tangga + Non Konsumsi Rumah Tangga. Meta indikator : Persentase ketersediaan pangan = <math>\frac{\text{Ketersediaan}}{\text{Kebutuhan}} \times 100\%</math></p>	Bidang TPH, SDP, Ketahanan Pangan, Peternakan, UPTD BBI TPHBUN, BPTPHBUN, BIBDPHTPT	Data Statistik Pertanian	
2	Meningkatnya sektor pertanian terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	<p>persentase nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor pertanian dalam suatu wilayah terhadap total nilai tambah seluruh sektor ekonomi di wilayah tersebut.</p>	<p>Persentase kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB</p> <p>Meta Indikator : <math>\frac{\text{Realisasi PDRB tahun } n}{\text{target PDRB tahun } n} \times 100\%</math></p>	Bidang Perkebunan, PPPHP, UPTD BBI TPHBUN, BPTPHBUN, BPSB TPHBUN, BSMKP	BPS	

Sumber : Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025

### 2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025

Tabel 8 : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan startegis	Persentase ketersediaan pangan strategis Meta indikator : Ketersediaan/ Kebutuhan x 100%	100%
2	Meningkatnya sektor pertanian terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB  Meta indikator : Realisasi PBRB tahun n/ target PDRB tahun n x 100%	10,63%

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali 2025

### 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), beserta target kinerja dan anggaran.

Tabel 9 : Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan startegis	Persentase ketersediaan pangan strategis Meta indicator : Ketersediaan/ Kebutuhan x 100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	Meningkatnya sektor pertanian terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB  Meta indikator : Realisasi PBRB tahun n/ target PDRB tahun n x 100%	10,63%

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025

## 2.5 Instrumen Pendukung

Informasi yang akurat dan mudah serta cepat untuk diakses sangat penting untuk pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, untuk mewujudkannya diperlukan sebuah perangkat teknologi untuk mengantarkan informasi tersebut, yaitu teknologi informasi.

Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Provinsi Bali dalam penyampaian informasi kepada masyarakat telah menggunakan berbagai media informasi untuk mendukung dinamika kelembagaan, seperti brosur, leaflet, bulletin, ekspose dan media massa lainnya. Tetapi dalam perkembangannya, penggunaan berbagai media tersebut dipandang masih kurang dikarenakan semakin tidak terbatasnya ruang dan waktu untuk mewadahi perkembangan informasi tersebut.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali mengelola satu buah website, yaitu : <http://www.distanpangan.baliprov.go.id> dan email [distanpangan@baliprov.go.id](mailto:distanpangan@baliprov.go.id).

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan maka ditetapkan interval nilai sebagai tolok ukur dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 10 : Skala Nilai Peringkat Kinerja.

<b>No</b>	<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja</b>	<b>Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja</b>	<b>Kode</b>
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi	<b>hijau tua</b>
2	76% ≤ 90%	Tinggi	<b>hijau muda</b>
3	66% ≤ 75%	Sedang	<b>kuning tua</b>
4	51% ≤ 65%	Rendah	<b>kuning muda</b>
5	≤ 50%	Sangat Rendah	<b>merah</b>

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

## 2. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

## 3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Sasaran Strategis sesuai RPD 2024 - 2026 yang kemudian diharmonisasi dengan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali yaitu :

1. Peningkatan kualitas, distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan pokok asal tumbuhan.
2. Peningkatan produktifitas lahan pertanian tanaman pangan
3. Sistem subak sebagai tulang punggung irigasi lahan pertanian sawah Provinsi Bali
4. Penyediaan bibit unggul pertanian tanaman pangan dalam arti luas yang menjadi pasar lokal dan ekspor
5. Pembangunan sistem Standar Kualitas Minimal (SKM) produk hasil pertanian tanaman pangan unggulan pasar lokal dan berorientasi ekspor.
6. Pembangunan sumber daya manusia unggul di bidang pertanian dan agroindustri dalam arti luas
7. Pemberdayaan petani menjadi produksi industri pangan olahan hasil pertanian

Sasaran strategis akan ditempuh dengan pendekatan yaitu :

1. Pengembangan kawasan agribisnis
2. Penataan manajemen rantai pasokan
3. Penerapan budidaya pertanian yang baik (GAP) dan (SPO)
4. Fasilitasi terpadu investasi tanaman hortikultura
5. Pengembangan kelembagaan usaha

6. Peningkatan konsumsi dan akselerasi ekspor.
7. Mendorong kinerja antar sub sistem agribisnis
8. Meningkatkan akses petani terhadap sumber daya teknologi, modal dan pasar
9. Mendorong peningkatan produktivitas, produksi dan kualitas hasil
10. Mendorong usaha diversifikasi dan pengembangan pola integrasi
11. Pemberdayaan petani melalui penguatan kelembagaan petani.

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, meningkatnya produksi padi, jagung, kedele, bawang dan cabe komoditas hortikultura, perkebunan dan peternakan. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan pemanfaatan sumber daya pertanian yang ada di Provinsi Bali (baik sumber daya alam dan sumber daya manusia) untuk menghasilkan produk pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dalam rangka menyediakan pangan dalam jumlah dan jenis yang beragam guna memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk Provinsi Bali.

#### 3.1.1 Capaian Realisasi Tahun 2025

Tabel 11 : Capaian Realisasi Tahun 2025

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja	Kriteria/Kode	Target RPD/Renstra
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan startegis	Persentase ketersediaan pangan strategis	Persentase	100	245.39	245.39	hijau tua	100

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja	Kriteria/ Kode	Target RPD/Renstra
		meta indikator : ketersediaan = (produksi + stok+ impor) - ekspor, kebutuhan = Konsumsi Rumah Tangga + Non Konsumsi Rumah Tangga. Persentase ketersediaan pangan = Ketersediaan/ Kebutuhan x 100%						
2	Meningkatnya sektor pertanian terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB  meta indikator : Persentase kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB	Persentase	10.63	13,02	122,48	hijau tua	10.64

Sumber : Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2025 dan Berita Resmi BPS Triwulan IV Tahun 2025

Adapun analisis capaian kinerja persasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

#### A. Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Pangan startegis

1. Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Pangan startegis diukur dengan indicator Persentase ketersediaan pangan strategis dan meta indicator : ketersediaan = (produksi + stok+ impor) - ekspor, kebutuhan = Konsumsi Rumah Tangga + Non Konsumsi Rumah Tangga. Persentase ketersediaan pangan = Ketersediaan/ Kebutuhan x 100%.
2. Persentase ketersediaan pangan strategis dengan target 100 persen terrealisasi 245,39 persen atau 245,39% dengan cara perhitungan sebagai berikut :

Ketersediaan :

Produksi = 298.877 ton

Stok = 1.085.339 ton

Impor = 275.564 ton

Jumlah ketersediaan = Produksi + Stok + Impor  
= 298.877 + 1.085.339 + 275.564  
= 1.527.533 ton

Kebutuhan :

Konsumsi rumah tangga = 586.429 ton

Konsumsi non rumah tangga = 36.053 ton

Jumlah kebutuhan = konsumsi rumah tangga + konsumsi non rumah tangga  
= 586.429 + 36.053  
= 622.483 ton

Persentase ketersediaan = jumlah ketersediaan/jumlah kebutuhan x 100%  
= 1.527.533/622.483 x 100%  
= 245,39%

yang mengartikan capaian pada indikator ini di kategorikan sangat baik dan melampaui dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian tersebut menggambarkan ketersediaan pasokan pangan yang mencukupi bahkan melebihi kebutuhan normatif penduduk dalam kurun waktu evaluasi. Tingginya realisasi turut mendorong stabilitas harga serta ketahanan pangan lokal, selaras dengan sasaran utama pembangunan di bidang pertanian.

a) Faktor pendorong peningkatan ketersediaan pangan antara lain :

- **Peningkatan Produksi Lokal:** Produktivitas komoditas pangan utama meningkat signifikan. Data menunjukkan kenaikan produksi padi, sayuran, dan hortikultura akibat percepatan musim tanam dan dukungan teknologi budidaya yang lebih baik. Peningkatan hasil panen ini langsung menambah pasokan pangan di tingkat daerah.

- **Penambahan Stok dan Impor Terukur:** Sepanjang tahun, ketersediaan awal (stok cadangan) pangan diperkuat, sedangkan sebagian komoditas kunci (misalnya beras dan jagung) juga ditopang oleh penambahan pasokan melalui impor selektif. Pendapatan stok dan masuknya impor pangan membantu menstabilkan ketersediaan, seperti tercatat bahwa impor masuk turut “mempengaruhi ketersediaan bahan pangan pokok”.
  - **Kebijakan dan Program Pemerintah :** Berbagai kebijakan proaktif mendukung keberhasilan, antara lain subsidi pupuk dan benih, bantuan permodalan bagi petani, serta pengembangan infrastruktur irigasi. Program cadangan pangan daerah, pendampingan penyuluhan pertanian, serta kebijakan stabilisasi harga juga memperkuat ketahanan pasokan.
  - **Kolaborasi Stakeholder :** Sinergi antarsektor (pertanian, perdagangan, Bulog) dan keterlibatan petani serta swasta meningkatkan efisiensi rantai pasok pangan. Koordinasi lebih baik antara Dinas Pertanian, distributor, dan Bulog misalnya memastikan penyerapan hasil panen sehingga tidak menimbulkan penumpukan yang sia-sia
- b) Faktor penghambat peningkatan ketersediaan pangan antara lain :
- **Anomali Iklim dan Cuaca Ekstrem:** Meskipun capaian tinggi, faktor cuaca tetap menjadi tantangan. Terjadi beberapa anomali iklim yang menekan produktivitas komoditas tertentu (misalnya anomali curah hujan yang mengganggu tanaman padi). Perubahan cuaca ekstrem berpotensi menghambat masa panen atau bahkan menyebabkan gagal panen, sebagaimana diakui bahwa

“cuaca ekstrem membuat pangan yang dipanen mengalami penurunan dan terjadinya fluktuasi harga”.

- Gangguan Kesehatan Ternak : Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak sapi sempat menurunkan populasi hewan potong, sehingga pada tahun-tahun sebelumnya ketersediaan daging sapi berkurang. Meskipun tahun ini pemulihan berlangsung, potensi wabah lanjutan tetap menjadi risiko yang perlu diantisipasi.
- Distribusi dan Infrastruktur : Distribusi pangan antar wilayah terkadang menemui kendala logistik, terutama untuk daerah terpencil. Kelebihan pasokan di sentra produksi perlu didukung infrastruktur penyimpanan dan transportasi yang memadai agar tidak terjadi pembusukan atau kerusakan.
- Permintaan Pasar : Ketersediaan yang sangat tinggi berisiko menekan harga pasar petani. Keberhasilan pasokan harus diimbangi dengan penyerapan pasar, misalnya melalui pasokan untuk cadangan pemerintah atau program bantuan pangan, agar petani tetap mendapat harga wajar.

## **B. Sasaran Meningkatnya sektor pertanian terhadap PDRB**

1. Sasaran Meningkatnya sektor pertanian terhadap PDRB diukur dengan indikator Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB dan meta indikator : Persentase kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB.
2. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB dengan target 10,63 terrealisasi 13,02 atau 122,48% telah melampaui target yang telah ditetapkan pada Renstra dan dikategorikan sangat tinggi dengan rumus perhitungan persentase  $\text{Persentase} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB :  
target PDRB tahun n/Realisasi PDRB tahun n x 100%

Target PDRB tahun n = 10,63

Realisasi PDRB tahun n = 12,93

Persentase capaian kinerja =  $13,02/10,63 \times 100\%$   
= 122,48%

3. Realisasi di atas target tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian berperan lebih besar dari yang direncanakan dalam mendorong perekonomian local. Secara umum, keberhasilan ini menandakan bahwa kebijakan dan program sektor pertanian dapat memenuhi sasaran strategis daerah, serta menggambarkan ketahanan dan ketangguhan sektor ini dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Adapun faktor pendorong serta penghambat capaian pada indikator ini antara lain :

1. Faktor Pendorong antara lain :

- Peningkatan produktivitas dan diversifikasi komoditas. Adanya inovasi teknologi (benih unggul, mekanisasi) dan intensifikasi produksi mendorong kenaikan hasil panen tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan. Faktor ini sejalan dengan program pemerintah yang meningkatkan ketersediaan pangan utama.
- Kebijakan dan investasi infrastruktur pertanian. Dukungan modernisasi alat dan mesin pertanian, pembangunan serta perbaikan infrastruktur irigasi dan waduk (embung), dan perluasan lahan tanam terbukti menaikkan output pertanian. Program-program ini menopang produktivitas sehingga capaian meningkat.
- Peningkatan akses pasar dan ekspor. Kenaikan nilai ekspor komoditas unggulan (seperti minyak sawit, kopi, hortikultura) dan kebijakan hilirisasi menambah nilai tambah produksi. Dengan menasar pasar domestik dan internasional, kontribusi pertanian terhadap PDRB ikut terdongkrak.
- Sumber daya manusia dan kelembagaan. Peran penyuluh, kelompok tani, dan koordinasi antar pemangku

kepentingan (pemerintah pusat, provinsi, dan daerah) semakin kuat. Peningkatan kompetensi penyuluh dan pelatihan petani mempercepat adopsi teknologi pertanian, sehingga program-program peningkatan hasil lebih efektif.

- Ketersediaan sarana produksi. Penyediaan benih/bibit unggul, pupuk bersubsidi, dan sarana pertanian lainnya yang memadai mendukung capaian produksi tinggi. Kebijakan ini membantu petani meningkatkan efisiensi serta output tanpa menambah biaya tinggi.

## 2. Faktor penghambat antara lain :

- Alih fungsi dan lahan sempit. Berkurangnya area sawah karena alih guna lahan (untuk pemukiman atau industri) membatasi luasan lahan produktif. Rata-rata penguasaan lahan petani kecil hanya sekitar 0,2 ha, sehingga skala usaha terbatas. Kondisi lahan yang sempit membatasi potensi peningkatan produksi.
- Variasi iklim dan OPT. Ketidakpastian iklim (cuaca ekstrem) dan serangan hama/penyakit tanaman (OPT) menjadi kendala besar. Fluktuasi musim dan kejadian alam sulit diprediksi, yang kadang menurunkan hasil panen.
- Keterbatasan modal dan fluktuasi harga. Modal usaha tani sering tidak memadai, apalagi bila gagal panen. Selain itu, harga komoditas yang musiman (panen melimpah → harga jatuh, paceklik → harga melonjak) membuat pendapatan petani tidak stabil. Gejolak harga ini bisa menghambat investasi petani dan perencanaan produksi.
- Keterbatasan sarana produksi dan teknologi. Kesulitan akses terhadap input (pupuk, pestisida, benih bermutu) dan teknologi modern masih ada. Sulitnya memperoleh

saprodi dan minimnya akses ke teknologi pertanian canggih menyebabkan efisiensi usaha tani belum optimal.

- Infrastruktur irigasi belum merata. Meskipun ada perbaikan, masih terdapat wilayah yang belum terlayani irigasi cukup baik. Keterbatasan jaringan irigasi sekunder/tersier menghambat pengendalian air, sehingga produktivitas masih dapat ditingkatkan

### 3.1.2 Capaian Realisasi Tahun 2025 terhadap Realisasi Tahun 2024

Tabel 12 : Capaian Realisasi Tahun 2025 terhadap Realisasi Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		Persentase peningkatan/penurunan Capaian (+/-)
			2024	2025	2024	2025	
a	b	c	d	e	f	g	h = (g-f)/f*100%
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Startegis	Persentase ketersediaan pangan strategis Meta indikator : Ketersediaan/ Kebutuhan x 100%	100%	100%	193,00%	245,39%	27,42%
2	Meningkatnya sektor pertanian terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Meta indikator : Realisasi PBRB tahun n/ target PDRB tahun n x 100%	10,62%	10,63%	13,17%	13,02%	-1,14%

Sumber : Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2025 dan Berita Resmi BPS Triwulan IV Tahun 2025

## Analisis Capaian Kinerja Indikator Antara Tahun 2024 dengan Tahun 2025

### 1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Startegis

Sasaran ini menggunakan indikator *persentase ketersediaan pangan strategis*, yaitu rasio antara ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok strategis. Target yang ditetapkan adalah 100% untuk 2024 dan 2025, namun realisasinya jauh melebihi target: 193,00% pada 2024 dan 245,39% pada 2025. Selisih (gap) realisasi-target masing-masing +93,00 dan +145,39 poin, dengan capaian peningkatan 27,42%, sehingga pencapaian *terlampau* secara signifikan. Indikator kinerja yang melebihi target umumnya menunjukkan kinerja yang sangat baik; kinerja menyimpulkan “*target telah tercapai melebihi target*” ketika pencapaian mencapai 133,33%.

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Gap (%)	Status
Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis	% ketersediaan pangan strategis	2024	100,00	193,00	+93,00	Terlampau
		2025	100,00	245,39	+145,39	Terlampau

Interpretasi dan implikasi : Capaian jauh melebihi 100% menunjukkan ketahanan pangan yang sangat kuat. Pasokan pangan strategis melimpah, memungkinkan peningkatan cadangan pangan atau bahkan ekspor beras/komoditas strategis, yang menguntungkan stabilitas harga. Namun, realisasi yang sangat tinggi juga mengindikasikan bahwa target awal mungkin terlalu rendah atau produksi sangat meningkat sehingga perlu evaluasi ulang. Perlu diwaspadai potensi pemborosan atau penurunan harga jika kelebihan pasokan tidak diolah/ditampung dengan baik. Secara umum,

pencapaian di atas target ini mencerminkan keberhasilan program peningkatan produksi pangan dan menunjukkan kinerja yang sangat baik.

## 2. Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Indikator kedua adalah *kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB*, dihitung sebagai persentase PDRB yang berasal dari sektor pertanian. Target yang dipasang adalah 10,62% (2024) dan 10,63% (2025), sedangkan realisasinya tercatat 13,17% (2024) dan 13,02% (2025). Gap realisasi-target masing-masing +2,55 dan +2,39 poin. Dengan demikian pencapaian indikator ini *terlampau* (realisasi > target). Seperti sebelumnya, kelebihan pencapaian ini menggambarkan kinerja sektor pertanian yang baik.

Sasaran Strategis	Indikator	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Gap (%)	Status
Meningkatnya sektor pertanian terhadap PDRB	% kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	2024	10,62	13,17	+2,55	Terlampau
		2025	10,63	13,02	+2,39	Terlampau

Interpretasi dan implikasi : Capaian kontribusi 13,02% di atas target 10,63% menunjukkan sektor pertanian tumbuh lebih kuat dari yang diantisipasi. Sebagai perbandingan, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional pada 2024 sekitar 12,61%, sehingga pencapaian ini termasuk tinggi. Hal ini mengindikasikan peningkatan produktivitas atau output pertanian (atau relatif perlambatan sektor lain) yang memperbesar peranan pertanian. Implikasinya positif bagi ketahanan pangan dan perekonomian pedesaan: pendapatan petani cenderung meningkat dan suplai pangan domestik lebih terjamin. Namun di sisi lain, target

berikutnya perlu dievaluasi agar lebih menantang, karena pencapaian berulang jauh melebihi asumsi awal. Secara keseluruhan, hasil melebihi target ini menegaskan bahwa kinerja sektor pertanian tergolong baik.

### 3.1.3 Capaian kinerja tahun 2025 terhadap Target Kinerja Renstra dari masing-masing sasaran

Tabel 13 : Capaian kinerja tahun 2025 terhadap Kinerja (akhir renstra) untuk semua sasaran

No	Sasaran Strategis (Kinerja Utama)	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Target akhir tahun renstra 2024 -2026	Capaian s/d 2025 terhadap akhir Renstra	kode
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)			
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Startegis	Persentase ketersediaan pangan strategis  Meta indikator : Ketersediaan/ Kebutuhan x 100%	%	100	245,39	245.39	100	245,39	hijau tua
2	Meningkatnya sektor pertanian terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB  Meta indikator : Realisasi PBRB tahun n/ target PDRB tahun n x 100%	%	10,63	13,02	122,48	10,64	122,36	hijau tua

Sumber : Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2025 dan Berita Resmi BPS Triwulan IV Tahun 2025

### Analisis Capaian Kinerja Indikator Antara Tahun 2025 dengan Akhir Tahun Renstra

1. sasaran meningkatnya ketersediaan pangan startegis

ketersediaan bahan pangan pokok mengalami surplus pada tahun 2025 dengan realisasi 245,39% atau 1.527.533,86 ton dari total kebutuhan 622.483,12 ton. Bila dilihat dari indikator persentase ketersediaan pangan strategis dengan target pada tahun 2025 sebesar 100% dengan capaian kinerja 245.39% yang kemudian di bandingkan dengan target pada akhir renstra 2024 - 2026 sebesar 100%, maka capaian indikator Persentase ketersediaan pangan strategis adalah sebesar 245,39% hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pertanian dan Keatahanan Pangan dalam menjaga serta meningkatkan ketersediaan pangan strategis dapat dikatagorikan sangat baik, dengan dukungan dari program unggulan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan, adapun program tersebut antara lain :

1. Program peyediaan dan pengembangan sarana pertanian dengan tujuan utama adalah penyediaan benih/bibit yang berkualitas terutama penyediaan benih/bibit tanaman pangan, hortikultura, peyediaan semen beku yang terpilih dari indukan unggul lokal bali yang merupakan plasma nutfah bali antara lain : sapi dan babi, selain itu penyediaan pupuk organik dengan jumlah sebanyak 10.000.000 kg atau setara 10.000 ton berupa pupuk organic cair
2. Program pengendalian kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner bertujuan mengendalikan penyebaran sejumlah penyakit hewan menular baik antara hewan maupun ke manusia, beberapa penyakit yang menjadi fokus kegiatan pada program ini pengendalian penyakit rabies, dikutip dari portal <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rabies>, penyakit rabies adalah penyakit virus zoonosis yang dapat dicegah dengan vaksin, yang menyerang sistem saraf pusat, yang ditularkan melalui gigitan maupun cakaran hewan pembawa rabies seperti anjing, kucing, kelelawar. Selain penyakit rabies, penyakit PMK atau penyakit mulut dan kuku menjadi

fokus utama pengendalian yang dilakukan oleh dinas pertanian dan ketahanan pangan provinsi bali yang mana penyakit ini dapat menurunkan produksi daging dan susu pada hewan seperti sapi, kambing dan kerbau dan yang terakhir pengendalian penyakit LSD (Lumpy skin disease) dan penyakit ASF (African swine fever) yang umumnya menyerang hewan babi.

3. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian bertujuan pengendalian dan penanggulangan serangan OPT yang menyerang pada tanaman pangan dan hortikultura.
4. Program penyuluhan pertanian bertujuan meningkatkan pengetahuan serta wawasan petugas dan petani dalam meningkatkan produksi dan produktivitas baik pada komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang menunjang ketahanan pangan.
5. Program penanganan kerawanan pangan bertujuan menyiapkan langkah mitigasi wilayah yang teridentifikasi mengalami kerawanan pangan dan menyiapkan cadangan pangan daerah.
6. Program pengawasan keamanan pangan bertujuan memastikan pangan yang dikonsumsi aman untuk dikonsumsi sesuai dengan kaidah B2SA (beragam, bergizi, seimbang dan aman)

Dari keberhasilan pelaksanaan program – program diatas mempengaruhi peningkatan produksi beberapa komoditas antara lain Bawang Putih, Cabai Besar, Daging Ayam Ras, Telur Ayam, Bawang Merah, Daging Babi, Daging Sapi, peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya penggunaan bibit unggul, pakan berkualitas, dan teknologi peternakan modern meningkatkan produktivitas, disamping itu petani juga memperluas lahan tanam atau menggunakan varietas unggul, bantuan benih, pupuk, atau pakan guna meningkatkan produksi serta meningkatnya populasi ternak sapi akibat berhasilnya pengendalian wabah penyakit PMK yang terjadi pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.

## 2. Sasaran meningkatnya sektor pertanian terhadap PDRB

PDRB dapat dihitung dengan 3 pendekatan yaitu produksi, pengeluaran dan pendapatan. Pada praktiknya, PDRB sampai saat ini hanya dihitung dengan pendekatan produksi dan pengeluaran karena terkait dengan sumber data yang tersedia pada indikator kontribusi PDRB pada sector pertanian dengan target pada tahun 2025 sebesar 10,63% dengan capaian kinerja 122,48% yang kemudian dibandingkan dengan target pada akhir renstra sebesar 10,64% maka capaian indikator Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB sebesar 122,36% dengan katagori sangat baik dengan dukungan dari beberapa program antara lain :

1. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan tujuan dari program ini adalah meningkatkan pengolahan, pemasaran serta diversifikasi pangan.
2. Program peyediaan dan pengembangan sarana pertanian, tujuan dari program ini adalah penyediaan prasarana pertanian berupa alat dan mesin pertanian.
3. Program peyediaan dan pengembangan prasarana pertanian tujuan dari program ini adalah meyediakan benih/bibit tanaman perkebunan serta pelatihan dalam budidaya tanaman perkebunan.
4. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, tujuan dari program ini adalah memitigasi dampak perubahan iklim yang dapat mempengaruhi produksi dan produktivitas komoditas pertanian.
5. Program pengawasan keamanan pangan tujuan dari program ini adalah melakukan sertifikasi produk olahan yang aman di konsumsi.

Dari keberhasilan pelaksanaan program – program diatas dalam pemulihan ekonomi provinsi, namun pertumbuhan sektor ini relatif lebih lambat dibandingkan sektor pariwisata sehingga perlu kebijakan penguatan nilai tambah dan infrastruktur agribisnis.

### 3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun 2025 dengan capain kinerja nasional/provinsi.

Tabel 14 : Data ketersediaan pangan Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat Tahun 2025

#### DATA KETERSEDIAAN PANGAN PROVINSI BALI TAHUN 2025

Nama Provinsi	tahun	Jenis Komoditas	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	rasio
Bali	2025	beras	1.118.169,10	471.605,15	237,10
Bali	2025	daging babi	34.874,71	12.383,51	281,62
Bali	2025	daging sapi	7.584,44	1.540,87	492,22
Bali	2025	daging ayam	78.397,00	50.213,93	156,13
Bali	2025	telur ayam	87.245,84	33.095,74	263,62
Bali	2025	cabai besar/cabai merah	29.987,46	5.929,22	505,76
Bali	2025	cabai rawit	27.534,69	12.921,98	213,08
Bali	2025	bawang merah	69.663,68	17.329,60	401,99
Bali	2025	bawang putih	48.649,32	15.914,92	305,68
Bali	2025	jagung	25.427,63	1.548,20	1642,40
<b>total</b>			<b>1.527.533,86</b>	<b>622.483,12</b>	<b>245,39</b>

Sumber : Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2025

#### DATA KETERSEDIAAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (NTB) TAHUN 2025

Nama Provinsi	tahun	Jenis Komoditas	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	rasio
Nusa Tenggara Barat	2025	Beras	7.891.608	2.046.434	385,63
Nusa Tenggara Barat	2025	Jagung	3.658.571	2.116.071	172,89
Nusa Tenggara Barat	2025	Daging Sapi	189.795	79.674	238,21
Nusa Tenggara Barat	2025	Daging Ayam	565.699	185.914	304,28
Nusa Tenggara Barat	2025	Telur Ayam	335.736	187.813	178,76
Nusa Tenggara Barat	2025	Minyak Goreng	511.436	334.007	153,12
Nusa Tenggara Barat	2025	Gula Pasir	167.746	145.408	115,36
Nusa Tenggara Barat	2025	Cabe Rawit	207.461	78.712	263,57

Nama Provinsi	tahun	Jenis Komoditas	Ketersediaan (Ton)	Kebutuhan (Ton)	rasio
Nusa Tenggara Barat	2025	Cabe Keriting	65.553	27.773	236,03
Nusa Tenggara Barat	2025	Bawang Merah	394.253	189.527	208,02
Nusa Tenggara Barat	2036	Bawang Putih	84.757	38.836	218,24
<b>total</b>			<b>14.072.614</b>	<b>5.430.169</b>	<b>259,16</b>

Sumber : portal NTB satu data ([https://data.ntbprov.go.id/dataset/9cc2a989-073a-4791-9895-9813fbcf3bfb/show?utm\\_source=chatgpt.com](https://data.ntbprov.go.id/dataset/9cc2a989-073a-4791-9895-9813fbcf3bfb/show?utm_source=chatgpt.com))

## DATA GAP KETERSEDIAAN PANGAN PROVINSI BALI DAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (NTB) PADA TAHUN 2025

komoditas	ketersediaan (ton) per provinsi		kebutuhan (ton) per provinsi		risio ( % )		gap (%)
	Provinsi Bali	Provinsi NTB	Provinsi bali	Provinsi NTB	Provinsi Bali	Provinsi NTB	
beras	1.118.169,10	7.891.608	471.605,15	2.046.434	237,10	385,63	148,53
daging babi	34.874,71		12.383,51		281,62		-281,62
daging sapi	7.584,44	189.794,55	1,540,87	79.674	492,22	238,21	-254,01
daging ayam	78.397	565.698,72	50.213,93	185.914	156,13	304,28	148,15
telur ayam	87.245,84	33.573,6	33.095,74	187.813	263,62	178,76	-84,86
cabai besar/cabai merah	29.987,46		5,929,22		505,76		-505,76
cabai rawit	27.534,69	207.461	12,921,98	78.712	213,08	263,57	50,49
bawang merah	69.663,68	394.253	17,329,6	189.527	401,99	208,02	-193,97
bawang putih	48.649,31	84.757	15.914,92	38.836	305,68	218,24	-87,44
jagung	25.427,63	3.658.571	1.548,20	2.116.071	1.642,40	172,89	-1.469,50
Minyak Goreng		511.436		334.007		153,12	153,12
Gula Pasir		167.746		145.408		115,36	115,36
Cabe Keriting		65.553		27.773		236,03	236,03
<b>total</b>	<b>1.527.533,86</b>	<b>14.072.614,27</b>	<b>622.483,12</b>	<b>5.430.169,48</b>	<b>245,39</b>	<b>259,16</b>	<b>13,76</b>

Sumber : Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2025 dan portal NTB satu data ([https://data.ntbprov.go.id/dataset/9cc2a989-073a-4791-9895-9813fbcf3bfb/show?utm\\_source=chatgpt.com](https://data.ntbprov.go.id/dataset/9cc2a989-073a-4791-9895-9813fbcf3bfb/show?utm_source=chatgpt.com)).

### **A. Analisa kinerja ketersediaan pangan pada tahun 2025 antara Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)**

Berdasarkan data ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis, secara agregat Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan kondisi surplus pangan, dengan total ketersediaan di Provinsi Bali sebanyak 1.527.533,86 ton dan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 14.072.614,27 ton, dengan kebutuhan pada Provinsi Bali sebanyak 622.483,12 ton dan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 5.430.169,48 ton, dengan proyeksi populasi penduduk pada provinsi sebanyak 4.488,24 ribu jiwa, dikutip dari portal BPS (<https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE0IzI=/proyeksi-penduduk-provinsi-bali-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin.html>) sedangkan pada Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan proyeksi jumlah populasi penduduk sebanyak 5.731.107 jiwa, dikutip dari portal BPS (<https://ntb.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjkjMg==/penduduk-kabupaten-kota.html>). Rasio ketersediaan adalah indikator yang mengukur perbandingan antara jumlah ketersediaan fisik pangan (dari produksi domestik, stok, dan impor) dengan jumlah kebutuhan konsumsi penduduk di suatu wilayah. Rasio ini digunakan untuk menilai ketahanan pangan, di mana rasio di atas 100% (ideal >120%) menunjukkan kondisi aman dan mandiri, dengan rumus perhitungan :

$$\text{Rasio Ketersediaan Pangan} = \left( \frac{\text{Total Ketersediaan Pangan}}{\text{Total Kebutuhan Pangan}} \right) \times 100\%$$

Dengan kriteria sebagai berikut :

**Tahan Pangan:** Jika rasio ketersediaan  $\geq 100\%$  dari total kebutuhan.

**Rawan Pangan:** Jika ketersediaan pangan lebih kecil dari 80% dari jumlah konsumsi atau kebutuhan

Rasio ketersediaan Provinsi Bali 245,39% dan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 259,16% hal ini menunjukkan bahwa kedua provinsi ini dalam kondisi aman dan melebihi ambang batas yang telah ditetapkan meskipun terdapat gap dari rasio ketersediaan pangan 13,76% antara kedua provinsi. Analisis perkomoditas akan dijelaskan dibawah ini :

1. Komoditas beras Provinsi Bali memiliki rasio 237,10%, sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Barat 385,63%. Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan kapasitas produksi beras yang sangat kuat dan berpotensi sebagai lumbung pangan regional.
2. Komoditas daging sapi Provinsi Bali mencapai rasio 492,22%, jauh di atas Provinsi Nusa Tenggara Barat (238,21%). Hal ini menunjukkan Provinsi Bali memiliki kapasitas produksi dan/atau distribusi daging sapi yang sangat tinggi.
3. Komoditas daging ayam Provinsi Nusa Tenggara Barat (304,28%) lebih tinggi dibanding Provinsi Bali (156,13%). Produksi ayam Provinsi Nusa Tenggara Barat relatif lebih dominan dibanding Provinsi Bali.
4. Komoditas Telur ayam Provinsi Bali (263,62%) lebih unggul dibanding Provinsi Nusa Tenggara Barat (178,76%). Bali berpotensi menjadi pemasok telur regional.

5. Komoditas Cabai dan Bawang Cabai besar Provinsi Bali sangat tinggi (505,76%), Cabai rawit Provinsi Nusa Tenggara Barat sedikit lebih unggul (263,57%), Bawang merah (401.99%) dan bawang putih (305.68%) Provinsi Bali lebih tinggi dibanding Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Komoditas jagung Provinsi Bali dengan rasio 1642.40% dibandingkan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan rasio 172.89% hal ini disebabkan oleh jumlah kebutuhan perbedaan kebutuhan antara Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, semakin tinggi kebutuhan semakin kecil juga tingkat rasio ketersediaan pangan.

## **B. Analisa Capaian Produktivitas Padi, Jagung, Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Rawit, Cabai merah dan Produksi Daging sapi, Daging Ayam dan Telur.**

### **1. Produktivitas Padi**

Produktivitas tanaman pangan adalah ukuran rata-rata hasil panen (output) per satuan luas lahan (input) dalam satu periode tanam, biasanya diukur dalam ton per hektar (ton/Ha) atau kuintal per hektar (kw/Ha), dengan rumus perhitungan produktivitas :

$$\text{Produktivitas} = \text{Produksi (ton atau Kw)} / \text{Luas Panen (Ha)}$$

Ket : Kw = Kwintal

Ha = Hektar

Mengutip dari portal BPS : (<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjUwNiMy/produksi-padi-menurut-provinsi--bulanan-.html>) dan (<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjUwNCMy/luas-panen-padi-menurut-provinsi--bulanan--hektar-.html>). Produksi padi bali sebesar 609.316,94 ton dan luas panen sebesar 98.751,06 Ha, sedangkan produksi padi nasional secara umum sebesar 60.247.036,33 ton dan luas panen 11.332.475,46 Ha. Perbandingan produktivitas padi sawah di Provinsi Bali sebesar 6,17 ton/Ha lebih besar dibandingkan rata – rata produktivitas nasional sebesar 5,32 ton/Ha hal ini didukung program – program unggulan dari dinas pertanian dan ketahanan pangan provinsi bali dalam meningkatkan produktivitas padi antara lain program peyediaan dan pengembangan sarana pertanian dengan fokus utama penyediaan benih padi yang berkualitas, penyediaan pupuk organik serta program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dengan fokus utama pengendalian OPT pada tanaman pangan serta penerapan inovasi teknologi budidaya. Rata – rata Produktivitas Padi secara nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 15 : Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Menurut Provinsi tahun 2025

**Data luas panen, produksi dan produktivitas tanaman padi pada tahun 2025**

<b>No</b>	<b>Nama Provinsi</b>	<b>Produksi (ton)</b>	<b>Luas panen (Ha)</b>	<b>Produktivitas (ton/Ha)</b>
1	ACEH	1.586.178,36	279.913,19	5,67
2	SUMATERA UTARA	2.728.713,61	537.044,23	5,08
3	SUMATERA BARAT	1.366.175,77	283.819,19	4,81
4	RIAU	222.283,01	59.991,96	3,71
5	JAMBI	367.889,6	81.190,58	4,53
6	SUMATERA SELATAN	3.598.736,37	635.958,09	5,66
7	BENGGKULU	270.908,75	53.010,89	5,11

No	Nama Provinsi	Produksi (ton)	Luas panen (Ha)	Produktivitas (ton/Ha)
8	LAMPUNG	3.202.242,45	597.720,05	5,36
9	KEP. BANGKA BELITUNG	62.480,95	16.219,48	3,85
10	KEP. RIAU	581,97	200,46	2,90
11	DKI JAKARTA	1.448,65	272,57	5,31
12	JAWA BARAT	10.240.405,48	1.758.947,65	5,82
13	JAWA TENGAH	9.409.108,4	1.675.081,9	5,62
14	DI YOGYAKARTA	550.504,87	107.541,36	5,12
15	JAWA TIMUR	10.557.881,96	1.842.518,73	5,73
16	BANTEN	1.811.685,9	349.228,17	5,19
17	BALI	609.316,94	98.751,06	6,17
18	NUSA TENGGARA BARAT	1.698.283,02	322.926,87	5,26
19	NUSA TENGGARA TIMUR	958.234,35	212.453,55	4,51
20	KALIMANTAN BARAT	770.521,38	262.686,27	2,93
21	KALIMANTAN TENGAH	330.115,51	97.101,53	3,40
22	KALIMANTAN SELATAN	1.183.427,25	290.433,81	4,07
23	KALIMANTAN TIMUR	271.803,59	66.479,66	4,09
24	KALIMANTAN UTARA	37.301,9	10.133,16	3,68
25	SULAWESI UTARA	266.888,93	60.249,97	4,43
26	SULAWESI TENGAH	900.389,5	197.859,69	4,55
27	SULAWESI SELATAN	5.399.172,44	1.038.155,4	5,20
28	SULAWESI TENGGARA	675.547,58	153.431,72	4,40
29	GORONTALO	280.223,37	53.909,34	5,20
30	SULAWESI BARAT	381.494,31	74.131,68	5,15
31	MALUKU	104.388,65	24.868,47	4,20
32	MALUKU UTARA	21.685,91	6.524,52	3,32
33	PAPUA BARAT	13.649,78	2.698,33	5,06
34	PAPUA BARAT DAYA	938,3	314,05	2,99
35	PAPUA	1.896,93	440,56	4,31
36	PAPUA SELATAN	360.132,63	79.113,11	4,55
37	PAPUA TENGAH	3.993,74	1.060,08	3,77
38	PAPUA PEGUNUNGAN	404,22	94,15	4,29
<b>INDONESIA</b>		<b>60.247.036,33</b>	<b>11.332.475,46</b>	<b>5,32</b>

Sumber : data BPS Tahun 2025

## 2. Produktivitas Jagung

Tabel 16 : Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Jagung Menurut Provinsi tahun 2025

Data Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Jagung Menurut Provinsi tahun 2025

No	Provinsi	Produksi Jagung (ton)	luas panen (Ha)	produktivitas (ton/Ha)
1	ACEH	46.744,81	8.455,59	5,53
2	SUMATERA UTARA	1.279.169	203.610	6,28
3	SUMATERA BARAT	550.409,7	85.778,77	6,42
4	RIAU	4.309,71	997,73	4,32
5	JAMBI	26.737,57	4,507,59	5,93
6	SUMATERA SELATAN	40,1175,3	60,437,74	6,64
7	BENGGULU	66.703,87	10.446,45	6,39
8	LAMPUNG	1.259.482	19.4487,8	6,48
9	KEP. BANGKA BELITUNG	3.301,5	1.108,34	2,98
10	KEP. RIAU	23,73	6,12	3,88
11	DKI JAKARTA	0	0	0,00
12	JAWA BARAT	7.948.154	108.667,4	7,31
13	JAWA TENGAH	2.750.971	454.362,6	6,05
14	DI YOGYAKARTA	210.518,2	4.1527,4	5,07
15	JAWA TIMUR	4.587.516	758.468,7	6,05
16	BANTEN	146.45,85	2.643,88	5,54
17	BALI	38.139,38	7.479,28	5,10
18	NUSA TENGGARA BARAT	1.175.152	173.088,1	6,79
19	NUSA TENGGARA TIMUR	305.335,4	114.515,8	2,67
20	KALIMANTAN BARAT	181.842	34.320,26	5,30
21	KALIMANTAN TENGAH	43.874,17	9.953,39	4,41
22	KALIMANTAN SELATAN	159.092,8	25.944,35	6,13
23	KALIMANTAN TIMUR	10.292,42	2.107,74	4,88
24	KALIMANTAN UTARA	5.060,75	1.051,88	4,81
25	SULAWESI UTARA	108.365,4	26.271	4,12
26	SULAWESI TENGAH	82.889,76	18.145,36	4,57
27	SULAWESI SELATAN	1.295.646	205.723,3	6,30
28	SULAWESI TENGGARA	54.804,41	14.612,5	3,75
29	GORONTALO	653.286,4	130.517,5	5,01
30	SULAWESI BARAT	23.810,8	4.727,46	5,04

No	Provinsi	Produksi Jagung (ton)	luas panen (Ha)	produktivitas (ton/Ha)
31	MALUKU	6.930,9	2.627,62	2,64
32	MALUKU UTARA	4.133,96	1.162,02	3,56
33	PAPUA BARAT	1.304,17	286,95	4,54
34	PAPUA BARAT DAYA	2.734,93	430,59	6,35
35	PAPUA	2.414,55	484,23	4,99
36	PAPUA SELATAN	2.909,57	539,35	5,39
37	PAPUA TENGAH	4.391,79	920,26	4,77
38	PAPUA PEGUNUNGAN	231,29	42,2	5,48
	<b>INDONESIA</b>	<b>16.159.166</b>	<b>2.710.457</b>	<b>5,96</b>

Sumber : data BPS Tahun 2025

Analisa produktivitas tanaman jagung pada tahun 2025 dapat di jelaskan sebagai berikut dikutip dari portal BPS : (<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjUwNSMy/luas-panen-jagung-pipilan-menurut-provinsi--bulanan---hektar-.html> ) dan (<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjUwNyMy/produksi-jagung-pipilan-kering-kadar-air-14-persen-menurut-provinsi--bulanan---ton-.html>). Berdasarkan data tahun berjalan, produksi jagung Provinsi Bali mencapai 38.139,38 ton dengan luas panen 7.479,28 Ha dan produktivitas sebesar 5,10 ton/Ha. dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 5,96 ton/Ha, maka produktivitas jagung Bali masih berada 0,86 ton/Ha di bawah capaian nasional. Secara peringkat nasional, Bali berada pada kelompok menengah (peringkat sekitar 20 dari 38 provinsi). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja teknis budidaya jagung di Bali cukup stabil, namun belum kompetitif dibandingkan sentra utama jagung nasional seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB, dan Lampung. Kontribusi produksi Bali terhadap nasional relatif kecil ( $\pm 0,24\%$ ), sehingga peran Bali lebih bersifat lokal/regional dibanding sebagai penopang utama ketahanan jagung nasional.

### 3. Produktivitas Bawang Merah, Bawang Putih, Cabe Rawit dan Cabe Besar

Tabel 17 : Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Bawang Merah, Bawang Putih, Cabe Rawit dan Cabe Besar Menurut Provinsi tahun 2024

Data Produktivitas Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Bawang Merah, Bawang Putih, Cabe Rawit dan Cabe Besar Menurut Provinsi tahun 2024.

Provinsi	Produksi Bawang Merah (kuintal) (Kw)	Luas Panen Bawang Merah (hektar) (Ha)	produktivitas (Kw/Ha)	Produksi Bawang Putih (kuintal) (Kw)	Luas Panen Bawang Putih (hektar) (Ha)	produktivitas (Kw/Ha)	Produksi Cabai Rawit (kuintal) (Kw)	Luas Panen Cabai Rawit (hektar) (Ha)	produktivitas (Kw/Ha)	Produksi Cabai Besar/ TW/ Teropong (kuintal) (Kw)	Luas Panen Cabai Besar/ TW/ Teropong (hektar) (Ha)	produktivitas (Kw/Ha)
Aceh	131.843,96	1.418,19	92,97				644.939,16	5.393,64	119,57	34.266	175	195,81
Sumatera Utara	580.699,86	3.861,34	150,39	366,5	8,5	43,12	841.180,30	6.873,02	122,39	29.294,19	229,83	127,46
Sumatera Barat	2.307.184,11	14.843,15	155,44	8.678,5	84,1	103,19	27.7163,69	3.169,38	87,45	2,26	1,13	2,00
Riau	2.455,15	44,4	55,30				62.856,38	1.060,57	59,27	11.396,1	196,25	58,07
Jambi	122.876,65	1.554,9	79,03	2.260	39	57,95	435.784,76	1447,56	301,05	11.156	140,7	79,29
Sumatera Selatan	8.965,03	118,32	75,77				89.519,57	1.852,76	48,32	66.037,9	1.560,47	42,32
Bengkulu	7.222,15	152,8	47,27				24.2079,1	3.032,65	79,82	296.531,85	4.184,28	70,87
Lampung	16.487,2	223,39	73,80				113.333,83	2.156,07	52,57	59.858,1	966,21	61,95

Provinsi	Produksi Bawang Merah (kuintal) (Kw)	Luas Panen Bawang Merah (hektar) (Ha)	produktivitas (Kw/Ha)	Produksi Bawang Putih (kuintal) (Kw)	Luas Panen Bawang Putih (hektar) (Ha)	produktivitas (Kw/Ha)	Produksi Cabai Rawit (kuintal) (Kw)	Luas Panen Cabai Rawit (hektar) (Ha)	produktivitas (Kw/Ha)	Produksi Cabai Besar/ TW/ Teropong (kuintal) (Kw)	Luas Panen Cabai Besar/ TW/ Teropong (hektar) (Ha)	produktivitas (Kw/Ha)
Kepulauan Bangka Belitung	1.198,46	26,7	44,89				60.092,78	651,68	92,21			
Kepulauan Riau	1.022,9	8,33	122,80				14.877,92	202,06	73,63	4.496,84	29,62	151,82
DKI Jakarta	129,27	3,27	39,53				404,15	11,48	35,20	1,2	0,2	6,00
Jawa Barat	1.998.916,86	17.917,88	111,56	3.433	50	68,66	1.637.558,85	13.479,57	121,48	1.441.340,45	10.672,9	135,05
Jawa Tengah	6.078.967,21	52.240,67	116,36	277,838,04	4.127,8	67,31	2.480.670,16	26.759,59	92,70	407.699,86	5.086,51	80,15
DI Yogyakarta	333.117,91	2.919,58	114,10				290.844,06	2.379,89	122,21	29.994,3	476	63,01
Jawa Timur	4.766.656,52	53.681,42	88,80	4.826,18	68,53	70,42	5.689.979,04	78.667,77	72,33	814.265,1	8.386,23	97,10
Banten	1.0807,01	206,45	52,35				27.051,26	349,67	77,36	2.841,89	70,35	40,40
Bali	350.993,58	1.228,03	285,82	1.166,74	21,45	54,39	231.907,06	2.417,37	95,93	76.145,64	479,39	158,84
Nusa Tenggara Barat	1.598.852,8	15.160,44	105,46	94.293	787	119,81	941.552,26	8.330,63	113,02	104.445,36	1.108,14	94,25
Nusa Tenggara Timur	81.046,35	1.387,9	58,39	1.510,24	124,88	12,09	112.891,23	1.715,44	65,81	12.829,41	333,31	38,49
Kalimantan Barat	216,88	12,15	17,85				94.679,93	2.766,31	34,23	24.407,39	561,75	43,45
Kalimantan Tengah	463,05	19,05	24,31				39.795	827,65	48,08	7.794	151,65	51,39

Provinsi	Produksi Bawang Merah (kuintal) (Kw)	Luas Panen Bawang Merah (hektar) (Ha)	produktivitas (Kw/Ha)	Produksi Bawang Putih (kuintal) (Kw)	Luas Panen Bawang Putih (hektar) (Ha)	produktivitas (Kw/Ha)	Produksi Cabai Rawit (kuintal) (Kw)	Luas Panen Cabai Rawit (hektar) (Ha)	produktivitas (Kw/Ha)	Produksi Cabai Besar/ TW/ Teropong (kuintal) (Kw)	Luas Panen Cabai Besar/ TW/ Teropong (hektar) (Ha)	produktivitas (Kw/Ha)
Kalimantan Selatan	4.900,9	86,21	56,85				125.753,72	2.347,21	53,58	81.930,35	1.036,18	79,07
Kalimantan Timur	3.444,55	55,81	61,72				64.675,69	1.218,7	53,07	10.073,48	230,83	43,64
Kalimantan Utara							69516.29	434.4	160.03	55728.85	230.85	241.41
Sulawesi Utara	27.506,49	663	41,49				132.955,76	3.826,72	34,74	228,5	9	25,39
Sulawesi Tengah	32.382,96	527,77	61,36				229.567,57	2.714,93	84,56	25.764,89	277,66	92,79
Sulawesi Selatan	2.351.870,02	18.974,39	123,95				364.571,3	6.333,82	57,56	162.255	2.011,42	80,67
Sulawesi Tenggara	7.821,48	231,92	33,72				38.915,56	1.349,75	28,83	16.230,29	456,49	35,55
Gorontalo	1.956	29,6	66,08				103.720,4	2.094,9	49,51			
Sulawesi Barat	8.818,9	492,7	17,90				32.753,37	4.312,26	7,60	23.507,01	4.228,36	5,56
Maluku	4.887,1	222,22	21,99				39.403,19	1.140,28	34,56	4.373,9	172,4	25,37
Maluku Utara	5.712,1	216,46	26,39				40.375,11	853,9.	47,28	305	3,6	84,72
Papua Barat	1.902,36	152,6	12,47	0,24	0,02	12	12926,26	328,88	39,30	1.185,11	40,96	28,93
Papua Barat Daya	19,2	5	3,84				33.249,84	313,83	105,95	1.232,79	18,75	65,75
Papua	3.661,3	85,12	43,01	6	6	1	14.184,4	434,14	32,67	4.123,74	179,97	22,91
Papua Selatan	2.191,5	23,2	94,46				15.607,42	198.11	78.78	2.474,8	32,83	75,38

Provinsi	Produksi Bawang Merah (kuintal) (Kw)	Luas Panen Bawang Merah (hektar) (Ha)	produktivitas (Kw/Ha)	Produksi Bawang Putih (kuintal) (Kw)	Luas Panen Bawang Putih (hektar) (Ha)	produktivitas (Kw/Ha)	Produksi Cabai Rawit (kuintal) (Kw)	Luas Panen Cabai Rawit (hektar) (Ha)	produktivitas (Kw/Ha)	Produksi Cabai Besar/ TW/ Teropong (kuintal) (Kw)	Luas Panen Cabai Besar/ TW/ Teropong (hektar) (Ha)	produktivitas (Kw/Ha)
Papua Tengah	10,5	2	5,25	1,75	0,5	3,50	40.233,4	437.7	91.92	15.823	204	77,56
Papua Pegunungan												
Indonesia	20.857.208,27	188.796,36	110,47	394.380,19	5.317,78	74,16	15.687.569,77	191.884,29	81,76	3.840.040,55	43.943,22	87,39

Sumber : data BPS Tahun 2024

Analisis capaian produktivitas Bawang Merah, Bawang Putih, Cabe Rawit dan Cabe Besar dapat dijelaskan sebagai berikut, mengutip data dari portal BPS : <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/ZUhFd1JtZzJWVVpqWTJsV05XTllhVmhRSzFoNFFUMDkjMw==/produksi-tanaman-sayuran-dan-buahan-semusim-menurut-provinsi-dan-jenis-tanaman----2024.html?year=2024>. Berdasarkan data tahun 2024, produktivitas komoditas hortikultura strategis di Provinsi Bali menunjukkan kinerja yang bervariasi dibandingkan dengan rata-rata nasional, rata-rata produktivitas nasional: Bawang Merah: 110,47, Kw/Ha, Bawang Putih: 74,16 Kw/Ha, Cabai Rawit: 81,76 Kw/Ha, Cabai Besar: 87,39 Kw/Ha sedangkan capaian bali Bawang Merah: 285,82 Kw/Ha (sangat di atas nasional), Bawang Putih: 54,39 Kw/Ha (di bawah nasional), Cabai Rawit: 95,93 Kw/Ha (di atas nasional), Cabai Besar: 158,84 Kw/Ha (jauh di atas nasional) Hal ini menunjukkan bahwa Bali memiliki keunggulan kompetitif pada komoditas bawang merah dan cabai besar, serta cukup kompetitif pada cabai rawit. Namun demikian, bawang putih masih memerlukan peningkatan produktivitas.

#### 4. Produksi Daging Sapi, Daging Ayam dan Telur

Tabel 18 : Data produksi Daging Sapi, Daging Ayam dan Telur

Provinsi	Produksi Daging Sapi menurut Provinsi (Ton)	Produksi Daging Ayam Ras Pedaging menurut Provinsi (Ton)	Produksi Telur Ayam Petelur menurut Provinsi (Ton)
	2024	2024	2024
ACEH	11.006,35	43.729,45	10.351,29
SUMATERA UTARA	18.245,02	197.933,32	566.847,55
SUMATERA BARAT	14.901,15	65.210,59	341.789,34
RIAU	13457,12	104.720,53	5.752,83
JAMBI	3.571,72	57.538,76	40.441,09
SUMATERA SELATAN	11.810,74	134.257,09	226.104,75
BENGKULU	1.762,84	13.042,12	8.359,69
LAMPUNG	18.624,97	105.871,31	214.256,57
KEP. BANGKA BELITUNG	2.490,59	27.618,6	15.037,92
KEP. RIAU	2.202,23	21.864,73	20.150,77
DKI JAKARTA	14.925,17	0	0
JAWA BARAT	85.241,7	857.576,78	730.254,65
JAWA TENGAH	83.275,69	759.511,57	809.398,93
DI YOGYAKARTA	6.700,69	65.977,77	119.439,48
JAWA TIMUR	96.907,31	510.176,96	2.016.324,35
BANTEN	19.259,7	226.319,1	315.092,9
BALI	4.882,25	93.596,37	224.601,53
NUSA TENGGARA BARAT	11.356,76	47.948,96	49.404,03
NUSA TENGGARA TIMUR	6.234,53	19.946,77	4.828,45
KALIMANTAN BARAT	3.890,08	69.430,1	87.478,59
KALIMANTAN TENGAH	1.448,19	39.509,95	5.608,41
KALIMANTAN SELATAN	5.272,95	113.543,14	110.268,56
KALIMANTAN TIMUR	6.466,78	72.498,83	36.261,56
KALIMANTAN UTARA	632,91	5.945,67	2.162,86
SULAWESI UTARA	1.840,64	14.576,48	37.180,94
SULAWESI TENGAH	3.848,72	11.507,75	23.436,3
SULAWESI SELATAN	13.722,51	121.214,98	288.587,59
SULAWESI TENGGARA	5.985,22	10.356,98	3.165,01
GORONTALO	1.900,72	8.055,43	6.837,44
SULAWESI BARAT	1.174,18	5.370,28	2.201,62
MALUKU	1.279,24	958,98	1.534,93
MALUKU UTARA	1.530,33	134,26	181,81

Provinsi	Produksi Daging Sapi menurut Provinsi (Ton)	Produksi Daging Ayam Ras Pedaging menurut Provinsi (Ton)	Produksi Telur Ayam Petelur menurut Provinsi (Ton)
	2024	2024	2024
PAPUA BARAT	742,54	517,57	1.186,25
PAPUA BARAT DAYA	325,41	1.400,39	3.643,72
PAPUA	683,22	5.509,63	3.975,13
PAPUA SELATAN	439,03	574,25	4.584,18
PAPUA TENGAH	667,16	1.947,05	5.361,37
PAPUA PEGUNUNGAN	145,81	24,5	612,61
<b>INDONESIA</b>	<b>478.852,17</b>	<b>3.835.917</b>	<b>6.342.705</b>

Sumber : data BPS Tahun 2024

Analisa capaian produksi daging sapi, daging ayam, dan telur dapat dijelaskan sebagai berikut : dikutip dari portal BPS (<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDg4IzI=/produksi-daging-ayam-ras-pedaging-menurut-provinsi.html>, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDgwIzI=/produksi-daging-sapi-menurut-provinsi.html>, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDkxIzI=/produksi-telur-ayam-petelur-menurut-provinsi.html>) total produksi nasional (Indonesia) tahun 2024: Daging sapi : 478.852,17 ton, Daging ayam ras pedaging : 3.835.917 ton, Telur ayam petelur : 6.342.705 ton, yang mana struktur produksi nasional menunjukkan : Komoditas terbesar secara volume adalah telur ayam, dengan sentra produksi yang terkonsentrasi di Pulau Jawa, khususnya: Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Sedangkan data produksi bali terhadap produksi nasional pada komoditas daging sapi: 4.882,25 ton, daging ayam ras pedaging: 93.596,37 ton, telur ayam petelur : 224.601,53 ton dengan ringkasan data di bawah ini :

<b>Komoditas</b>	<b>Produksi (Ton)</b>	<b>Bali Produksi (Ton)</b>	<b>Nasional Kontribusi Bali</b>
Daging Sapi	4.882,25	478.852,17	<b>1,02%</b>
Daging Ayam	93.596,37	3.835.917	<b>2,44%</b>
Telur Ayam	224.601,53	6.342.705	<b>3,54%</b>

Hal ini menunjukkan kontribusi produksi daging sapi hanya sebesar 1,02% dari total produksi nasional hal ini di sebabkan oleh : Pola pemeliharaan masih banyak berbasis peternakan rakyat, keterbatasan lahan penggembalaan, alih fungsi lahan akibat sektor pariwisata. Pada kontribusi produksi daging ayam hanya sebesar 2,44% dari total produksi nasional hal ini disebabkan oleh : biaya pakan lebih tinggi (ketergantungan suplai luar daerah), skala usaha relatif lebih kecil, pasar domestik terbatas dibanding Jawa dan kontribusi terbesar Bali ada pada telur ayam (3,54%), Ini menunjukkan Bali relatif lebih kuat pada subsektor petelur dibandingkan sapi dan ayam pedaging hal ini disebabkan oleh : sistem kandang baterai relatif padat dan efisien lahan, konsumsi telur tinggi pada sektor pariwisata dan rumah tangga, distribusi relatif lebih mudah dan tidak tergantung RPH.

**c) Analisa Capaian Eksport Pertanian Provinsi Bali dibandingkan Eksport Pertanian Nasional Tahun 2025.**

Kinerja ekspor Provinsi Bali pada November 2025 tercatat berada di bawah capaian Oktober 2025 dan November 2024. Nilai ekspor Bali pada November 2025 tercatat sebesar US\$ 47.944.062, turun sebesar 5,50 persen dibandingkan nilai ekspor November 2024 yang tercatat sebesar US\$ 50.733.196.

Nilai ekspor Provinsi Bali pada November 2025 jika dilihat dari jenis komoditasnya, ekspor Bali didominasi oleh produk Ikan, krustasea, dan moluska (HS 03), yang tercatat sebesar US\$ 16.623.668 dengan *share* sebesar 34,67 persen dari total ekspor. Dibandingkan dengan November 2024, dari sepuluh komoditas utama ekspor, sembilan komoditas mengalami penurunan dengan penurunan terdalam tercatat pada ekspor produk Pakaian dan Aksesorinya (Rajutan) (HS 61). Ekspor komoditas tersebut mengalami penurunan sebesar 40,32 persen, dengan penurunan utama ke Amerika Serikat.

Jika diukur dari nilainya, porsi ekspor Provinsi Bali ke luar negeri pada periode Januari- November 2025 didominasi oleh ekspor produk Industri Pengolahan sebesar 86,99 persen dari total keseluruhan ekspor. Jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya, nilai ekspor sektor Industri Pengolahan turun sebesar 15,16 persen. Nilai ekspor produk pertanian pada periode Januari-November 2025 tercatat naik sebesar 20,52 persen, sementara nilai ekspor produk pertambangan turun sebesar 12,90 persen dibandingkan capaian periode sebelumnya.

Tabel 19 : Realisasi Eksport Produk Pertanian Tahun 2025

No.	Sektor	Jan - Nov 2024		Jan - Nov 2025		Perubahan (%)
		Nilai (US\$)	%	Nilai (US\$)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Industri Pengolahan	525.467.611	90,45	445.792.836	86,99	-15,16
2	Pertambangan	719.468	0,12	626.652	0,12	-12,90
3	Pertanian	54.787.764	9,43	66.031.501	12,89	20,52
<b>Total</b>		<b>580.974.843</b>	<b>100,00</b>	<b>512.450.989</b>	<b>100,00</b>	<b>-11,79</b>

Sumber : Berita Statistik BPS Tahun 2025

### 3.1.6 Analisis Keberhasilan/Kegagalan dalam pencapaian Tahun 2025

Tabel 20 : Analisis Keberhasilan/Kegagalan dalam pencapaian Tahun 2025.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN REALISASI	Analisis Capaian	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan startegis	Persentase ketersediaan pangan strategis  Meta indikator : Ketersediaan/ Kebutuhan x 100%	100%	245,39%	245,39%	Capaian peningkatan ketersediaan pangan strategis Bali tahun 2025 ditandai oleh surplus beras yang signifikan, keberhasilan program intensifikasi dan diversifikasi pangan, serta dukungan kebijakan pengendalian inflasi. Namun, tantangan tetap ada pada aspek akses, distribusi, dan kualitas pangan agar ketahanan pangan Bali tidak hanya kuat di sisi produksi, tetapi juga merata dirasakan masyarakat	Solusi peningkatan ketersediaan pangan strategis tahun mendatang di Indonesia berfokus pada penguatan cadangan pangan pemerintah, intervensi pasar, serta diversifikasi distribusi melalui program seperti SPHP beras dan jagung, Gerakan Pangan Murah, dan fasilitasi distribusi pangan. Pemerintah juga menyiapkan lebih dari seribu enumerator untuk pemantauan harga agar stabilitas pasokan dan keterjangkauan pangan tetap terjaga

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN REALISASI	Analisis Capaian	Solusi yang dilakukan
2	Meningkatnya sektor pertanian terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Meta indikator : Realisasi PBRB tahun n/ target PDRB tahun n x 100%	10,63%	13,02%	122,48%	PDRB sektor pertanian Provinsi Bali pada 2025 menunjukkan kontribusi yang stabil dan peran penting dalam ketahanan pangan lokal, didorong oleh peningkatan produksi komoditas strategis dan pemulihan ekonomi provinsi; namun pertumbuhan sektor ini relatif lebih lambat dibandingkan sektor pariwisata sehingga perlu kebijakan penguatan nilai tambah dan infrastruktur agribisnis	Solusi untuk meningkatkan PDRB sektor pertanian tahun mendatang adalah dengan mendorong modernisasi teknologi pertanian, memperkuat hilirisasi produk, memperluas akses pasar ekspor, serta meningkatkan efisiensi distribusi dan tata kelola. Pemerintah dan pelaku usaha harus fokus pada diversifikasi komoditas, pemberdayaan petani, serta penguatan infrastruktur logistik agar kontribusi pertanian terhadap PDRB lebih besar

Sumber : Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2025 dan Berita Resmi BPS Triwulan IV Tahun 2025

Dari data yang tersaji di atas maka dapat dianalisa beberapa faktor keberhasilan atau capaian setiap indikator antara lain :

1. Capaian ketersediaan pangan tahun 2025 sebesar 245,39% surplus menunjukkan kinerja yang sangat optimal dan jauh melampaui target. Keberhasilan ini merupakan hasil sinergi antara peningkatan produksi, efektivitas program, dan pengelolaan distribusi pangan yang baik. Ke depan, fokus perlu diarahkan pada pengelolaan surplus secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh petani dan masyarakat luas.

Faktor penyebab optimalnya kinerja tersebut antara lain :

- a. Adanya peningkatan luas tanam dan produktivitas komoditas pangan utama.
  - b. Penggunaan teknologi pertanian yang lebih baik (benih unggul, pemupukan berimbang, mekanisasi).
  - c. Kondisi iklim yang relatif mendukung selama musim tanam.
  - d. Dukungan sarana dan prasarana pertanian (irigasi, alsintan, pupuk)
  - e. Pendampingan petani dan penguatan kelembagaan tani.
  - f. Sistem distribusi pangan yang lebih lancar sehingga kehilangan pascapanen dapat ditekan.
  - g. Penguatan cadangan pangan daerah yang meningkatkan ketersediaan bersih.
  - h. Koordinasi antar wilayah dalam pengelolaan stok pangan.
2. Capaian PDRB sektor pertanian sebesar 13,02%, yang melampaui target 10,63%, menunjukkan kinerja sektor pertanian yang sangat baik dan berdaya saing. Keberhasilan ini mencerminkan efektivitas program pembangunan pertanian serta peran strategis sektor pertanian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB, adapun faktor – faktor penyebab tersebut antara lain :
- a. Terjadi peningkatan produksi komoditas unggulan pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, maupun perkebunan.

- b. Penerapan teknologi pertanian dan perbaikan manajemen usaha tani meningkatkan produktivitas dan nilai tambah.
- c. Harga komoditas pertanian relatif stabil dan cenderung menguntungkan petani.
- d. Meningkatnya permintaan pasar, baik untuk konsumsi lokal maupun antar daerah.
- e. Meningkatnya aktivitas pengolahan hasil pertanian memberikan kontribusi nilai tambah terhadap PDRB.
- f. UMKM sektor pertanian dan agroindustri mulai berkembang

### **3.1.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.**

Analisis efisiensi sumber daya adalah proses evaluasi untuk mengetahui seberapa efektif suatu organisasi dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sumber daya keuangan merupakan salah satu jenis sumber daya organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dengan membandingkan capaian kinerja dengan serapan anggaran, dapat diketahui seberapa efisien sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Perhitungan ini relatif mudah dilakukan, karena hanya memerlukan data tentang capaian kinerja dan serapan anggaran.

Perhitungan efisiensi dilakukan dengan menggunakan acuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-237 Tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan (Nabilah, 2023), kriteria penetapan tingkat efisiensi anggaran belanja adalah sebagai berikut :

- Tidak Efisien : Efisiensi > 100%
- Kurang Efisien : Efisiensi 90% - 100%
- Cukup Efisien : Efisiensi 80% - 90%
- Efisien : Efisiensi 60% - 80%
- Sangat Efisien : Efisiensi < 60%

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya terdiri dari analisis efisiensi penggunaan sumber daya keuangan dan analisis penggunaan lahan atau penggunaan sumber daya alam.

- a) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya keuangan adalah suatu proses evaluasi yang bertujuan untuk menilai sejauh mana dana atau anggaran yang tersedia digunakan secara hemat, tepat guna, dan optimal dalam menghasilkan output dan outcome yang telah ditetapkan.
- b) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya alam atau penggunaan lahan adalah Analisis efisiensi penggunaan sumber daya alam adalah suatu proses evaluasi yang bertujuan untuk menilai sejauh mana sumber daya alam (seperti lahan, air, hutan, mineral, dan sumber daya hayati) dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan output maksimal dengan dampak lingkungan seminimal mungkin.

A. analisis efisinsi penggunaan sumber daya keuangan

Data Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 21 : Data Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Thn 2025)	Realisasi	Program Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Efisiensi	katagori
						Uraian	Indikator Kegiatan	Uraian	Indikator Kegiatan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan startegis	Persentase ketersediaan pangan strategis	100%	245,39%	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	15.137.996.310	15.113.591.956	99.84	0.16	sangat efisien
						Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Tercapainya Pengawasan Mutu, Penyediaan, Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	197.683.732	197.064.972	99.69	0.31	sangat efisien

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Thn 2025)	Realisasi	Program Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Efisiensi	katagori
						Uraian	Indikator Kegiatan	Uraian	Indikator Kegiatan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
							Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan		Jumlah Benih Unggul Bersertifikat Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Yang Terawasi, Tersedia Dan Beredar Yang Memenuhi Standar Mutu Yang Ditetapkan Sesuai Sasaran 6 Tepat, Yaitu Tepat Jenis/Varietas, Mutu, Jumlah, Waktu, Tempat Dan Harga	3.058.842.105	2.406.255.200	78.67	21.33	efisien
								Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	584.166.955	559.554.000	95.79	4.21	sangat efisien

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Thn 2025)	Realisasi	Program Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Efisiensi	katagori
						Uraian	Indikator Kegiatan	Uraian	Indikator Kegiatan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	373.483.732	361.384.713	96.76	3.24	sangat efisien
								Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	322.247.891	300.031.940	93.11	6.89	sangat efisien
						Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	12.043.454.132	11.985.602.212	99.52	0.48	sangat efisien

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Thn 2025)	Realisasi	Program Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Efisiensi	katagori
						Uraian	Indikator Kegiatan	Uraian	Indikator Kegiatan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.951.140.851	1.674.430.833	85.82	14.18	efisien
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1.010.261.800	910.107.950	90.09	9.91	sangat efisien
					PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	150.623.335	136.007.020	90.3	9.7	sangat efisien

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Thn 2025)	Realisasi	Program Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Efisiensi	katagori
						Uraian	Indikator Kegiatan	Uraian	Indikator Kegiatan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	213.927.505	198.256.270	92.67	7.33	sangat efisien
						penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah HPR yang mendapatkan pelayanan vaksinasi	8.882.272.553	6.384.894.922	71.88	28.12	efisien
						kesejahteraan hewan	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	65.364.492	62.587.407	95.75	4.25	sangat efisien

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Thn 2025)	Realisasi	Program Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Efisiensi	katagori
						Uraian	Indikator Kegiatan	Uraian	Indikator Kegiatan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	342.943.450	327.311.904	95.44	4.56	sangat efisien
								Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	220.259.419	182.152.684	82.7	17.3	efisien
					PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	71.280.515	70.759.275	99.27	0.73	sangat efisien

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Thn 2025)	Realisasi	Program Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Efisiensi	katagori
						Uraian	Indikator Kegiatan	Uraian	Indikator Kegiatan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan di tingkatkan kapasitasnya	57.000.000	43.700.000	76.67	23.33	efisien
					PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	73.772.715	71.114.765	96.4	3.6	sangat efisien
						Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.050.663.327	906.209.195	86.25	13.75	efisien

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Thn 2025)	Realisasi	Program Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Efisiensi	katagori
						Uraian	Indikator Kegiatan	Uraian	Indikator Kegiatan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	84.535.015	83.709.945	99.02	0.98	sangat efisien
2	Meningkatnya sektor pertanian terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	10,63%	13,02%	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1.625.509.142	1.615.044.182	99.36	0.64	sangat efisien

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Thn 2025)	Realisasi	Program Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Efisiensi	katagori
						Uraian	Indikator Kegiatan	Uraian	Indikator Kegiatan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Tercapainya Pengawasan Mutu, Penyediaan, Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah Benih Unggul Bersertifikat Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Yang Terawasi, Tersedia Dan Beredar Yang Memenuhi Standar Mutu Yang Ditetapkan Seusai Sasaran 6 Tepat, Yaitu Tepat Jenis/Varietas, Mutu, Jumlah, Waktu, Tempat Dan Harga	1.077.021.922	1.031.622.394	95.78	4.22	sangat efisien
						Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	703.243.365	687.513.555	97.76	2.24	sangat efisien

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Thn 2025)	Realisasi	Program Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Efisiensi	katagori
						Uraian	Indikator Kegiatan	Uraian	Indikator Kegiatan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	47.194.200	46.108.200	97.70	2.3	sangat efisien
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	543.948.422	542.709.977	99.77	0.23	sangat efisien
					PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	285.383.657	242.466.315	84.96	15.04	efisien

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Thn 2025)	Realisasi	Program Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Efisiensi	katagori
						Uraian	Indikator Kegiatan	Uraian	Indikator Kegiatan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
					PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	246.234.104	200.332.494	81.36	18.64	efisien
								Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	112.621.702	94.580.880	83.98	16.02	efisien

Sumber : Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2025

Analisis efisinsi penggunaan sumber daya keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Hampir seluruh kegiatan berada dalam kategori sangat efisien. Efisiensi anggaran berkisar antara 0,16% sampai 28,12% dan tidak terdapat pemborosan anggaran signifikan, dengan dukungan program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian berjalan efektif dan mendukung stabilitas pangan daerah, serta program diversifikasi pangan, pengembangan benih dan penguatan prasarana pertanian memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi sektor pertanian, meskipun ada beberapa program dengan cakupan efisiensi anggaran dengan persentase 70 – 80%.

Analisis keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan/sub kegiatan

Tabel 22 : Data Keberhasilan dan Kegagalan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Thn 2025)	Realisasi	Program Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
						Uraian	Indikator Kegiatan	Uraian	Indikator Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan startegis	Persentase ketersediaan pangan strategis	100%	245.39%	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	15.137.996.310	15.113.591.956	99,84	Menunjang
						Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Tercapainya Pengawasan Mutu, Penyediaan, Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	197.683.732	197.064.972	99,69	Menunjang
								Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah Benih Unggul Bersertifikat Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Yang Terawasi, Tersedia Dan Beredar Yang Memenuhi Standar Mutu Yang Ditetapkan Sesuai Sasaran 6 Tepat, Yaitu Tepat Jenis/Varietas, Mutu, Jumlah, Waktu, Tempat Dan Harga	3.058.842.105	2.406.255.200	78,67	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Thn 2025)	Realisasi	Program Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
						Uraian	Indikator Kegiatan	Uraian	Indikator Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	584.166.955	559.554.000	95,79	Menunjang
								Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	373.483.732	361.384.713	96,76	Menunjang
								Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	322.247.891	300.031.940	93,11	Menunjang
						Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	12.043.454.132	11.985.602.212	99,52	Menunjang
								Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.951.140.851	1.674.430.833	85,82	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Thn 2025)	Realisasi	Program Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
						Uraian	Indikator Kegiatan	Uraian	Indikator Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1.010.261.800	910.107.950	90,09	Menunjang
					PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	150.623.335	136.007.020	90,30	Menunjang
								Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	213.927.505	198.256.270	92,67	Menunjang
						penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah HPR yang mendapatkan pelayanan vaksinasi	8.882.272.553	6.384.894.922	71,88	Menunjang
						kesejahteraan hewan	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	65.364.492	62.587.407	95,75	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Thn 2025)	Realisasi	Program Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
						Uraian	Indikator Kegiatan	Uraian	Indikator Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	342.943.450	327.311.904	95,44	Menunjang
								Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	220.259.419	182.152.684	82,70	Menunjang
					PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	71.280.515	70.759.275	99,27	Menunjang
								Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan di tingkatkan kapasitasnya	57.000.000	43.700.000	76,67	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Thn 2025)	Realisasi	Program Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
						Uraian	Indikator Kegiatan	Uraian	Indikator Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	73.772.715	71.114.765	96,40	Menunjang
						Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.050.663.327	906.209.195	86,25	Menunjang
					PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	84.535.015	83.709.945	99,02	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Thn 2025)	Realisasi	Program Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
						Uraian	Indikator Kegiatan	Uraian	Indikator Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Meningkatnya sektor pertanian terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	10,63%	12.95%	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1.625.509.142	1.615.044.182	99,36	Menunjang
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Tercapainya Pengawasan Mutu, Penyediaan, Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah Benih Unggul Bersertifikat Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Yang Terawasi, Tersedia Dan Beredar Yang Memenuhi Standar Mutu Yang Ditetapkan Sesuai Sasaran 6 Tepat, Yaitu Tepat Jenis/Varietas, Mutu, Jumlah, Waktu, Tempat Dan Harga	1.077.021.922	1.031.622.394	95,78	Menunjang
						Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	703.243.365	687.513.555	97,76	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Thn 2025)	Realisasi	Program Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
						Uraian	Indikator Kegiatan	Uraian	Indikator Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	47.194.200	46.108.200	97,70	Menunjang
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	543.948.422	542.709.977	99,77	Menunjang
					PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	285.383.657	242.466.315	84,96	Menunjang
					PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi Yang Dibina	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	246.234.104	200.332.494	81,36	Menunjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Thn 2025)	Realisasi	Program Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Menunjang/Tidak Menunjang
						Uraian	Indikator Kegiatan	Uraian	Indikator Kegiatan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	112.621.702	94.580.880	83,98	Menunjang

Sumber : Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2025

Analisis keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan/sub kegiatan adalah sebagai berikut :

1. sasaran meningkatnya ketersediaan pangan startegis

Realisasi indikator ketersediaan pangan strategis tahun 2025 sebesar 245,39%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ketersediaan pangan strategis berada dalam kondisi surplus dan sangat aman, capaian ini dipengaruhi oleh optimalnya program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, tingginya realisasi kegiatan perbanyak benih bersertifikat, efektivitas pengawasan mutu dan distribusi sarana produksi, stabilitas distribusi dan cadangan pangan daerah. Sebagian besar kegiatan pendukung memiliki realisasi anggaran di atas 90%, bahkan beberapa mencapai di atas 99%, yang menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berjalan efektif. Kegiatan dengan capaian tinggi antara lain : Pengawasan Sarana Pertanian (99,84%), Sertifikasi Benih (99,69%), Bimbingan Produksi Benih/Bibit Ternak (99,52%), Penyuluhan Pertanian (99,27%), Pengawasan Keamanan Pangan

(99,02%) dan kegiatan dengan capaian kurang dari 85% antara lain : Vaksinasi penyakit hewan (71,88%), Peningkatan kapasitas penyuluh (76,67%), Pengawasan mutu benih hortikultura (78,67%), Penanggulangan pasca bencana (82,70%). Meskipun realisasi beberapa kegiatan masih di bawah 85%, seluruh kegiatan tetap berstatus menunjang terhadap pencapaian sasaran strategis.

2. sasaran meningkatnya sektor pertanian terhadap PDRB

Realisasi kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 13,02%, melampaui target 10,63%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, peningkatan ini didukung oleh program diversifikasi dan stabilisasi pangan daerah, peningkatan mutu dan sertifikasi benih, pengembangan sumber daya genetik, penataan prasarana pertanian, pengendalian dampak perubahan iklim, Sebagian besar kegiatan memiliki realisasi anggaran di atas 95%, yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan bersatus menunjang keberhasilan sasaran yang telah di tetapkan.

B. Analisis Efisiensi penggunaan Sumber Daya

Tabel 23 : Realisasi Indeks Penanaman (IP) Tahun 2025

Kabupaten/kota	LBS 2024	LT 2024	IP 2024 (%)	LT 2025*	IP 2025 (%)*
Jembrana	6.553	10.213	156	11.116	170
Tabanan	19.991	34.134	171	34.566	173
Badung	9.099	16.875	185	13.604	150
Gianyar	10.847	23.053	213	21.681	200
Klungkung	3.719	4.928	133	4.871	131
Bangli	2.139	4.068	190	3.275	153
Karangasem	7.184	11.041	154	11.750	164
Buleleng	7.349	17.016	232	16.235	221
Denpasar	1.680	2.952	176	2.877	171
<b>Bali</b>	<b>68.560</b>	<b>124.281</b>	<b>181</b>	<b>119.977</b>	<b>175</b>

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025

Lahan merupakan salah satu sumber daya penting dalam proses budidaya pertanian. Lahan sawah di Bali tahun 2024 seluas 68.560 Ha, tersebar di 9 Kab/Kota.

Indek Penanaman (IP) merupakan indikator yang dipakai untuk menunjukkan frekuensi pemnafaatan lahan sawah untuk ditanami tanaman semusim misalnya padi. IP dapat dipakai sebagai indikator efisiensi penggunaan sumber daya pertanian, karena semakin efisien penggunaan lahan, air dan prasarana produksi (alat dan mesin pertanian) maka IP akan semakin besar.

Rumus perhitungan IP :

$$IP = \frac{LuasTanam(LT)}{LuasBakuSawah(LBS)} \times 100\%$$

$$= 119.997/68.560 \times 100\% = 175\%$$

Analisis indeks pertanaman (IP) dapat dijelaskan sebagai berikut indeks pertanaman (IP) di provinsi Bali pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 3,31% dari dari realisasi IP pada tahun 2024 sebesar 181% menjadi 175% di tahun 2025, akan tetapi IP di beberapa kabupaten mengalami kenaikan antara lain Kabupaten Jembrana sebesar 170%, Kabupaten Tabanan 173%, Kabupaten Karangasem 164% hal ini disebabkan oleh adanya perbaikan infrastruktur irigasi, manajemen pola tanam, stabilitasi ketersediaan air dan terakhir adanya dukungan dari program – program pemerintah, selain kabupaten yang mengalami peningkatan nilai IP, ada pula Kabupaten yang nilai IPnya turun dari tahun 2024 antara lain Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar, hal ini disebabkan oleh adanya tekanan dari sektor pariwisata terutamanya terhadap alih fungsi lahan, anomali iklim, keterbatasan sumber air, kenaikan biaya produksi dan fragmentasi lahan.

Rekomendasi atau upaya perbaikan dalam meningkatkan nilai IP untuk tahun – tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. pengendalian lah fungsi lahan dengan meperkuat regulasi perlindungan lahan produktif atau sawah dengan regulasi LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan).
2. Merehabilitasi jaringan irigasi dan embung.
3. Kalender tanam berbasis iklim.
4. Penggunaan benih dan pupuk yang telah bersertifikat.
5. Moderisasi alat dan mesin pertanian.
6. Penguatan ekonomi petani melalui stabilisasi harga gabah.

### 3.1.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Tabel 24 : Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	DINAS (SEKRET/BIDANG)										
	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Angka Kecukupan Energi (AKE)	2680	kkal	1.124.436.042	2447	977.323.960	86,92	86,92	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1	dokumen	73.772.715	1	71.114.765	100,00	96,40	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1	dokumen	73.772.715	1	71.114.765	100,00	96,40	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Cadangan Pangan Daerah	1	dokumen	1.050.663.327	1	906.209.195	100,00	86,25	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih dari 1 Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Daerah Provinsi	9	LPM	1.050.663.327	9	906.209.195	100,00	86,25	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
166				ton	166		100,00		86,25		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Informasi Harga Pangan yang Terpublikasi	92	%	1.625.509.142	92	1.615.044.182	100,00	99,36	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah kelompok yang menerapkan SOP mutu pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	18	dokumen	1.625.509.142	18	1.615.044.182	100,00	99,36	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	3	dokumen	1.625.509.142	3	1.615.044.182	100,00	99,36	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi	95.9	%	84.535.015	95.9	83.709.945	100,00	99,02	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Diuji	1	dokumen	84.535.015	1	83.709.945	100,00	99,02	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi yang Dibina	1	dokumen	84.535.015	1	83.709.945	100,00	99,02	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,6	nilai	56.291.649.504	83,46	53.559.563.433	102,28	95,15	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	dokumen	485.121.149	7	471.270.307	100,00	97,14	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	dokumen	296.633.227	6	291.753.727	100,00	98,36	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	dokumen	188.487.922	1	179.516.580	100,00	95,24	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	dokumen	51.914.068.522	1	49.631.500.221	100,00	95,60	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	275	orang	51.668.380.982	275	49.391.683.011	95,59	95,59	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
3.27.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	dokumen	245.687.540	1	239.817.210	100,00	97,61	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	paket	384.830.100	1	314.936.796	100,00	81,84	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	tahun	19.63.000	1	13.068.000	100,00	67,84	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	tahun	212.430.700	1	178.051.360	100,00	83,82	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	tahun	67.003.400	1	63.300.560	100,00	94,47	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	tahun	19.125.000	1	18.021.750	100,00	94,23	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	dokumen	67.008.000	2	42.495.126	100,00	63,42	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	dokumen	758.687.236	12	684.497.724	100,00	90,22	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	dokumen	417.000.000	12	343.321.313	100,00	82,33	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	dokumen	341.687.236	12	341.176.411	100,00	99,85	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	paket	2.748.942.497	1	2.457.358.385	100,00	89,39	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	58	unit	1.944.486.888	58	1.665.328.388	100,00	85,64	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24	unit	593.655.609	24	586.255.599	100,00	98,75	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	380	unit	210.800.000	380	205.774.398	100,00	97,62	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Penyaluran Sarana Pertanian	90	%	31.107.402.010	90	30.358.517.445	100,00	97,59	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura	0,7	%		0,7		100,00	97,59	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	0,7	%		0,7		100,00	97,59	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan	0,7	%		0,7		100,00	97,59	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
			Persentase Peningkatan Populasi Ternak	0,82	%		0,82		100,00	97,59	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	3	dokumen	15.137.996.310	3	15.113.591.956	99,84	99,84	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	3	dokumen	15.137.996.310	3	15.113.591.956	99,84	99,84	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Angka Kelahiran Ternak Unggulan Daerah	3	dokumen	12.043.454.132	3	11.985.602.212	99,52	99,52	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	6000	ekor	12.043.454.132	6000	11.985.602.212	100,00	99,52	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Peningkatan Target Areal Sasaran Komoditas Pertanian	3	dokumen	3.925.951.568	3	3.259.323.277	100,00	83,02	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah Benih Unggul Bersertifikat Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Yang Terawasi, Tersedia Dan Beredar Yang Memenuhi Standar Mutu yang Ditetapkan Sesuai Sasaran 6 Tepat, Yaitu Tepat Jenis/Varietas, Mutu, Jumlah, Waktu, Tempat Dan Harga	80	%	3.925.951.568	80	3.259.323.277	100,00	83,02	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana Kawasan Pertanian	15	%	1.554.210.222	15	1.554.210.222	100,00	93,48	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Penataan Prasarana Pendukung Pertanian	1	dokumen	1.554.210.222	1	1.554.210.222	100,00	93,48	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1	dokumen	543.948.422	1	542.709.977	99,77	99,77	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1	laporan	1.010.261.800	1	910.107.950	100,00	90,09	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	5	dokumen	8.947.637.045	5	6.447.482.329	100,00	72,06	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah HPR yang mendapatkan pelayanan vaksinasi	200720	ekor	8.882.272.553	200720	6.384.894.922	100,00	71,88	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau Kawasan yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam Satu Daerah Provinsi	2	laporan	8.882.272.553	2	6.384.894.922	100,00	71,88	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan	Jumlah pengawasan Ante Mortem dan Post Mortem	8	RPH	65.364.492	8	62.587.407	100,00	95,75	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.04.1.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	3	kasus	65.364.492	3	62.587.407	100,00	95,75	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Petani Berbasis Kawasan dan Produk Unggulan	60	%	128.280.515	60	114.459.275	100,00	89,23	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP dan Kelompok Tani Yang Terbina	102	kelompok	128.280.515	102	114.459.275	100,00	89,23	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	102	kelompok	71.280.515	102	70.759.275	100,00	99,27	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3.27.07.1.02.0001	Penyediaan dan peningkatan kapasitas penyulu pertanian	jumlah penyuluh yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	10	orang	57.000.000	10	43.700.000	100,00	76,67	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Rata-rata capaian kinerja (%)						100.863.659.495		94.608.918.496		93,80	
Predikat kinerja				sangat baik							
<b>II</b>	<b>UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK</b>										
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,6	nilai	957.077.174	83,46	916.737.439	102,28	95,79	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1	tahun	49.721.700	1	44.497.240	100,00	89,49	
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	6.095.200	1	5.756.000	100,00	94,43	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	11.126.500	1	7.075.440	100,00	63,59	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	32.500.000	1	31.665.800	100,00	97,43	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1	tahun	355.015.144	1	330.519.785	100,00	93,10	
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	66.000.000	12	41.657.841	100,00	63,12	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	289.015.144	12	288.861.944	100,00	99,95	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1	tahun	552.340.330	1	541.720.414	100,00	98,08	
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8	unit	265.015.968	8	255.973.868	100,00	96,59	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	282.454.362	1	281.796.546	100,00	99,77	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7	unit	4.870.000	7	3.950.000	100,00	81,11	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Penyaluran Sarana Pertanian	90	%	1.951.140.851	90	1.674.430.833	100,00	85,82	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
			Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura	0,7	%		0,7		100,00		UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
			Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	0,7	%		0,7		100,00		UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
			Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan	0,7	%		0,7		100,00		UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
			Persentase Peningkatan Populasi Ternak	0,82	%		0,82		100,00		UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	3	laporan	1.951.140.851	3	1.674.430.833	100,00	85,82	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	umlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3	laporan	1.951.140.851	3	1.674.430.833	100,00	85,82	UPTD BALAI INSEMINASI BUATAN DAERAH, PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja (%)						2.908.218.025		2,591.168.272		89,10	
Predikat kinerja				baik							
III	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN										
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,6	nilai	419.496.651	83,46	373.131.976	102,28	88,95	UPTD BALAI PERBENIHAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1	tahun	42.995.000	1	37.404.365	100,00	87,00		
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	1.996.900	1	1.684.000	100,00	84,33	UPTD BALAI PERBENIHAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	5.998.100	1	4.968.365	100,00	82,83	UPTD BALAI PERBENIHAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	35.000.000	1	30.752.000	100,00	87,86	UPTD BALAI PERBENIHAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1	tahun	238.933.667	1	202.868.427	100,00	84,91		
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	117.912.191	12	81.984.951	100,00	69,53	UPTD BALAI PERBENIHAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporam	121.021.476	12	120.883.476	100,00	99,89	UPTD BALAI PERBENIHAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1	tahun	137.567.984	1	132.859.184	100,00	96,58	
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25	unit	92.081.492	25	87.627.292	100,00	95,16	UPTD BALAI PERBENIHAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	unit	42.566.492	5	42.531.892	100,00	99,92	UPTD BALAI PERBENIHAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	unit	2.920.000	4	2.700.000	100,00	92,47	UPTD BALAI PERBENIHAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Penyaluran Sarana Pertanian	90	%	2.030.336.143	90	1.954.592.408	100,00	96,27	UPTD BALAI PERBENIHAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura	0,7	%		0,7		100,00		UPTD BALAI PERBENIHAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	0,7	%		0,7		100,00		UPTD BALAI PERBENIHAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan	0,7	%		0,7		100,00		UPTD BALAI PERBENIHAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			Persentase Peningkatan Populasi Ternak	0,82	%		0,82		98,78		UPTD BALAI PERBENIHAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Peningkatan Target Areal Sasaran Komoditas Pertanian	3	dokumen	2.030.336.143	3	1.954.592.408	100,00	96,27	
	3.27.02.1.02.0007	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	jumlah Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	37.500	batang	584.166.955	37.500	559.554.000	100,00	95,79	UPTD BALAI PERBENIHAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0011	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	jumlah Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	5.000.000	gram	703.243.365	5.000.000	687.513.555	100,00	97,76	UPTD BALAI PERBENIHAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0013	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	jumlah Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	3	ton	373.483.732	3	361.384.713	100,00	96,76	UPTD BALAI PERBENIHAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0014	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	jumlah Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	0,75	ton	322.247.891	0,75	300.031.940	100,00	93,11	UPTD BALAI PERBENIHAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.03.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	jumlah Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	1	dokumen	47.194.200	1	46.108.200	100,00	97,70	UPTD BALAI PERBENIHAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja (%)						2.449.832.794		2.327.724.384		95,02	
Predikat kinerja				sangat baik							
<b>IV</b>	<b>UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN</b>										
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,6	nilai	1.139.927.251	83,46	1.059.623.954	102,28	92,96	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1	tahun	55.655.900	1	54.051.020	100,00	97,12	
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	599.900	1	531.500	100,00	88,60	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	5.056.000	1	3.919.520	100,00	77,52	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	50.000.000	1	49.600.000	100,00	99,20	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1	tahun	424.884.660	1	372.429.966			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	220.520.000	12	168.269.006	100,00	76,31	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	204.364.660	12	204.160.960	100,00	99,90	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1	tahun	659.386.691	1	633.142.968			
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	78	unit	245.299.476	78	229.706.376	100,00	93,64	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	unit	408.887.215	5	398.461.592	100,00	97,45	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	148	unit	5.200.000	148	4.975.000	100,00	95,67	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	
3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Terkendalinya Organisme Pengganggu Tanaman OPT dan Dampak Perubahan Iklim DPI	82,91	%	848.586.526	82,91	751.930.903	100,00	88,61	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.27.05.1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim DPI dan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan OPT	9	kab/kota	848.586.526	9	751.930.903	100,00	88,61	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.27.05.1.01.0001		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan OPT Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	4	ha	342.943.450	4	327.311.904	100,00	95,44	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.27.05.1.01.0002		Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	2	ha	285.383.657	2	242.466.315	100,00	84,96	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.27.05.1.01.0005		Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	1	laporan	220.259.419	1	182.152.684	100,00	82,70	UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	
Rata-rata capaian kinerja (%)						1.988.513.777		1.811.554.857		91,10	
Predikat kinerja				sangat baik							
<b>V</b>	<b>UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN</b>										
	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,6	nilai	632.738.604	83,46	604.851.648	102,28	95,59	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	tahun	68.130.160	1	62.755.209	100,00	92,11	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	3.927.800	1	3.901.000	100,00	99,32	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	31.702.360	1	26.950.209	100,00	85,01	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	32.500.000	1	31.904.000	100,00	98,17	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	tahun	251.484.476	1	249.320.271	100,00	99,14	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	127.230.000	12	125.188.795	100,00	98,40	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	124.254.476	12	124.131.476	100,00	99,90	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	tahun	313.123.968	1	292.776.168	100,00	93,50	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7	unit	185.930.984	7	173.129.684	100,00	93,12	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	unit	85.132.984	1	80.132.984	100,00	94,13	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	73	unit	42.060.000	73	39.513.500	100,00	93,95	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan Aman Konsumsi	95,8	%	358.855.806	95,8	294.913.374	100,00	82,18	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
			Persentase Produk Bersertifikat Organik	1,1	%		1,1		100,00		UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Yang Tersertifikasi dan Teregistrasi	8	sertifikat	358.855.806	8	294.913.374	100,00	82,18	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	5	sertifikat	246.234.104	5	200.332.494	100,00	81,36	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	3	sertifikat	112.621.702	3	94.580.880	100,00	83,98	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis dan Zoonosis	5	%	364.550.840	5	334.263.290	100,00	91,69	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha PAH	1000	unit	364.550.840	1000	334.263.290	100,00	91,69	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
Jumlah PSAT yang diuji			75	unit	75		100,00		UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN		
	3.27.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	1000	unit	150,623,335	1000	136,007,020	100,00	90,30	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	75	unit	213.927.505	75	198.256.270	100,00	92,67	UPTD BALAI SERTIFIKASI MUTU DAN KEAMANAN PANGAN
Rata-rata capaian kinerja (%)						1.356.145.250		1.234.028.312		91,00	
Predikat kinerja				sangat baik							
VI	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN										
	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	81,6	nilai	428.638.176	83,46	348.584.895	102,28	81,32	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1	tahun	42.966.500	1	40.060.444	100,00	93,24	
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	3.197.300	1	2.364.000	100,00	73,94	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	7.269.200	1	5.296.444	100,00	72,86	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	32.500.000	1	32.400.000	100,00	99,69	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1	tahun	220.205.184	1	155.342.309	100,00	70,54	
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	135.109.000	12	70.697.325	100,00	52,33	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	85.096.184	12	84.644.984	100,00	99,47	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1	tahun	165.466.492	1	153.182.142	100,00	92,58	
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	23	unit	133.666.492	23	123.109.292	100,00	92,10	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	unit	19.950.000	5	19.000.000	100,00	95,24	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17	unit	11.850.000	17	11.072.850	100,00	93,44	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Fasilitasi Penyaluran Sarana Pertanian	90	%	407.596.191	90	375.619.289	100,00	92,15	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura	0,7	%		0,7		100,00		UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	0,7	%		0,7		100,00		UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan	0,7	%		0,7		100,00		UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
			Persentase Peningkatan Populasi Ternak	0,82	%		0,82		100,00		UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Peningkatan Target Areal Sasaran Komoditas Pertanian	3	jenis	407.596.191	3	375.619.289	100,00	92,15	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang Dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung jawab
				K	satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	jumlah Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	75	sertifikat	197.683.732	75	197.064.972	99,69	99,69	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	jumlah Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	120	sertifikat	209.912.459	120	178.554.317	85,06	85,06	UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Rata-rata capaian kinerja (%)						836.234.367		724.204.184		86,60	
Predikat kinerja				baik							
<b>Rata-rata capaian kinerja (%) total Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>						<b>110.402.603.708</b>		<b>103.297.598.505</b>		<b>93,56</b>	
<b>Predikat kinerja total Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>				<b>sangat baik</b>							

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025

Analisis capaian program/kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

Rumus dasar perhitungan capaian program atau kegiatan adalah membagi realisasi (hasil aktual) dengan target yang ditetapkan, kemudian dikalikan 100% untuk mendapatkan persentase.

Formula atau rumus perhitungan capaian program/kegiatan :

$$\text{formula: } \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%.$$

1. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dengan target kinerja 92 persen sampai dengan bulan desember realisasi kinerja 100% dengan tingkat capaian kinerja 100% dengan kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilitas pasokan harga pangan dengan target kinerja 18 kelompok, realisasi kinerja 18 kelompok, capaian kinerja 100% dan sub kegiatan penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal dengan target kinerja 3 laporan, realisasi kinerja 3 laporan, capaian kinerja 100% dengan pagu Rp. 1.625.509.142 dan realisasi keuangan Rp. 1.615.044.182 dan realisasi fisik 100%.
2. Program penanganan kerawanan pangan dengan target kinerja 2680 kkal/perkapita/hari, realisasi 2449 kkal/perkapita/hari dengan capaian kinerja 100%, dengan kegiatan penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kewenangan provinsi dengan target kinerja 1 dokumen, realisasi kinerja 1 dokumen, capaian kinerja 100%, dengan sub kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan

Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota, target kinerja 1 dokumen, realisasi kinerja 1 dokumen dengan pagu anggaran Rp. 73.772.715, realisasi keuangan Rp. 71.114.765, realisasi fisik 100%. Pada kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi dengan target kinerja 9 LPM dan 166 ton, realisasi kinerja 9 LPM dan 166 ton, sub kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan target kinerja 1 dokumen, realisasi kinerja 1 dokumen, dengan pagu anggaran 1.050.663.327, realisasi keuangan Rp. 906.209.195, realisasi fisik 100%.

3. Program pengawasan keamanan pangan dengan target kinerja 95,9%, realisasi kinerja 95,9%, dengan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota, terget kinerja 1 dokumen, realisasi kinerja 1 dokumen, capaian kinerja 100%, sub kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan, target kinerja 1 dokumen, realisasi kinerja 1 dokumen , dengan pagu anggaran Rp.84.535.015 dan realisasi keuangan 83.709.945, realisasi fisik 100%, sub kegiatan Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan, target kinerja 5 sertifikat dengan realisasi kinerja 5 sertifikat, pagu anggaran Rp. 246.234.104, realisasi keuangan Rp.200.332.494, sub kegiatan Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota, target kinerja 12 dokumen, realisasi kinerja 12 dokumen dengan pagu anggaran Rp.112.621.702, realisasi keuangan Rp. 94.580.880 dan realisasi fisik 100%.

4. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanaiian dengan target kinerja 90%, realisasi kinerja 90%, dengan tingkat capaian kinerja 100%, kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, dengan target kinerja 3 laporan, realisasi kinerja 3 laporan, sub kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian, target kinerja 3 laporan, realisasi kinerja 3 laporan dengan pagu Rp. 15.137.996.310, realisasi keuangan Rp. 15.113.591.956, realisasi fisik 100%. Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman, target kinerja 3 dokumen, realisasi kinerja 3 dokumen, dengan pagu Rp. 3.925.951.568, realisasi keuangan Rp.3.259.323.277, realisasi fisik 100%, sub kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan, target kinerja 80%, realisasi kinerja 80%, Rp. 3.925.951.568, realisasi keuangan Rp.3.259.323.277, realisasi fisik 100% . kegiatan pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman target 3 jenis dan realisasi kinerja 3 jenis, Sub kegiatan Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih, target kinerja 75 sertifikat, realisasi kinerja 75% dan pagu anggaran Rp. 197.683.732, realisasi keuangan Rp. 197.064.972 dan realisasi fisik 100%, sub kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan, target kinerja 120 sertifikat, realisasi kinerja 120 sertifikat, pagu anggaran Rp. 209.912.459, realisasi keuangan Rp. 178.554.317, realisasi fisik 100%. Sub kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang, target kinerja 37.500 batang, realisasi kinerja 37.500 batang, pagu anggaran Rp. 584.166.955, realisasi keuangan Rp.559.554.000,

sub kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji, target kinerja 5.000.000 gram, realisasi kinerja 5.000.000 gram, pagu anggaran Rp.703.243.365, realisasi keuangan Rp.687.513.555, realisasi fisik 100%, sub kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih, target kinerja 3 ton, realisasi kinerja 3 ton, pagu anggaran Rp. 373.247.891 dan realisasi keuangan Rp. 361.384.713, realisasi fisik 100%, sub kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi, target kinerja 0,75 ton, realisasi kinerja 0,75 ton, pagu anggaran Rp. 322.247.891 dan realisasi keuangan Rp. 300.031.940, realisasi fisik 100%, kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi, target kinerja 1 laporan, realisasi kinerja 1 laporan, sub kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme, target kinerja 1 laporan, realisasi kinerja 1 laporan dengan pagu anggaran Rp. 47.194.200 dan realisasi keuangan Rp. 46.108.200, realisasi fisik 100%. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanaiian dengan target kinerja 0,82%, realisasi kinerja 0,82%, kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi, target kinerja 3 dokumen, realisasi kinerja 3 dokumen, sub kegiatan Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi, target kinerja 600 ekor, realisasi kinerja 600 ekor, pagu anggaran Rp.12.043.454.132, realisasi keuangan Rp. 11.985.602.212 dan realisasi fisik 100%, sub kegiatan

Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi, target kinerja 3 laporan, realisasi 3 laporan, pagu anggaran Rp 1.951.140.851, realisasi keuangan Rp. 1.674.430.833, realisasi fisik 100%.

5. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, target kinerja 15%, realisasi kinerja 15%, kegiatan Penataan Prasarana Pertanian, target kinerja 1 dokumen, realisasi kinerja 1 dokumen, sub kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian, target kinerja 1 dokumen, realisasi kinerja 1 dokumen, sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya, target kinerja 1 dokumen, realisasi kinerja 1 dokumen, pagu anggaran Rp.543.948.422, realisasi keuangan Rp.542.709.977, realisasi fisik 100%, sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pendataan prasarana pendukung pertanian lainnya, target kinerja 1 laporan, realisasi kinerja 1 laporan, pagu anggaran Rp. 1.010.261.800 dan realisasi keuangan Rp. 916.107.950, realisasi fisik 100%.
6. Program pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner, target kinerja 5%, realisasi kinerja 5%, kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, target 200,720 ekor dan 30,000 ekor, realisasi kinerja 200,720 ekor dan 30,000 ekor, sub kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, target kinerja 2 laporan, realisasi kinerja 2 laporan, pagu anggaran Rp. 8.882.272.553, realisasi pagu Rp.6.384.922. Kegiatan

Kesejahteraan Hewan, target kinerja 8 RPH, realisasi kinerja 8 RPH, sub kegiatan penanganan atas pelanggaran kesejahteraan hewan sesuai kewenangannya, target kinerja 3 kasus, realisasi kinerja 3 kasus, pagu anggaran Rp. 65.364.492 dan realisasi keuangan Rp. 62.587.407, sub kegiatan Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit, target kinerja 1000 unit PAH, realisasi kinerja 1000 unit PAH, pagu anggaran Rp. 150.623.335, realisasi keuangan Rp. 136.007.020, sub kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner target kinerja 75 sertifikat, realisasi 75 sertifikat, pagu anggaran Rp. 213.927.505, realisasi keuangan 198.256.270, dan realisasi fisik 100%.

7. Program penyuluhan pertanian dengan target kinerja 60%, realisasi kinerja 60%, kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian, target kinerja 102 kelompok, realisasi kinerja 102 kelompok, sub kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani, target 102 kelompok, dengan pagu Rp.71.280.515, realisasi keuangan Rp. 70.759.275, realisasi fisik 100%, sub kegiatan penyediaan dan peningkatan kapasitas penuluh pertanian, target 10 orang, pagu anggaran Rp. 57.000.000, realisasi keuangan 43.700.000, realisasi fisik 100%.
8. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dengan target kinerja 82,91%, realisasi kinerja 82,91%, kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi, target kinerja 9 kab/kota, realisasi kinerja 9 kab/kota, sub kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan

Perkebunan, target kinerja 4 Ha, realisasi kinerja 4 Ha, pagu anggaran Rp. 342.943.450, realisasi keuangan Rp. 327.311.904, realisasi fisik 100%, sub kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, target kinerja 2 Ha, realisasi kinerja 2 Ha, pagu anggaran Rp. 285.383.657, realisasi keuangan Rp. 242.466.315 dan realisasi fisik 100%, sub kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, target kinerja 1 laporan, realisasi kinerja 1 laporan, pagu anggaran Rp. 220.259.419 realisasi keuangan Rp. 182.152.684, realisasi fisik 100%.

### **3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2025**

#### **3.2.1 Dana APBD**

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali T.A 2025 melalui 9 Program dengan pagu anggaran sebesar Rp 110.402.603.708,-terrealisasi sebesar Rp 103.297.598.505 atau 93,56% dengan realisasi fisik mencapai 96,95%. Realisasi pengelolaan belanja dapat dilihat pada tabel 25.

#### **3.2.2 Dana Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) Anggaran APBN Tahun 2025**

Pada tahun 2025 jumlah kegiatan dari Dana Dekonsentrasi yang dikelola Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali dengan pagu kegiatan sebesar Rp. 2.000.027.000,- dengan realisasi keuangan Rp 638.976.818,- (31,95%), realisasi fisik 100%. Sedangkan untuk Tugas Pembantuan dengan pagu Rp 2.739.971.000,- realisasi keuangan sebesar Rp 2.538.551.438,- (92,64%), realisasi fisik 100,00%. Realisasi per masing - masing Program dapat dilihat pada tabel 26.

Tabel 25 : Realisasi Fisik dan Keuangan Dana APBD Tahun 2025

**Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025**

NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERGESERAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	PROSENTASE (%)				SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAHAN / UPAYA PEMECAHANNYA / KETERANGAN LAINNYA
				FISIK		KEUANGAN			
				T	R	T	R		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
<b>P3HP</b>		<b>1.625.509.142</b>	<b>1.615.044.182</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,36</b>	<b>10.464.960</b>	
1	2.09.03.1.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.625.509.142	1.615.044.182	100,00	100,00	100,00	99,36	10.464.960	
<b>KP</b>		<b>1.208.971.057</b>	<b>1.061.033.905</b>	<b>100,00</b>	<b>91,13</b>	<b>100,00</b>	<b>87,76</b>	<b>147.937.152</b>	
2	2.0 9.0 4.1.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	73.772.715	71.114.765	100,00	100,00	100,00	96,40	2.657.950	

NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERGESERAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	PROSENTASE (%)				SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAHAN / UPAYA PEMECAHANNYA / KETERANGAN LAINNYA
				FISIK		KEUANGAN			
				T	R	T	R		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	2.09.04.1.02.0002 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.050.663327	906.209.195	100,00	89,79	100,00	86,25	144.454.132	Hanya 16,68 Ton beras yang disalurkan sehingga memerlukan jasa distribusi Rp.600/kg.dan juga ada penawaran dari pihak ketiga yg melaksanakan jasa distribusi tersebut
4	2.09.05.1.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	84.535.015	83.709.945	100,00	100,00	100,00	99,02	825.070	
<b>SEKRET</b>		<b>56.291.649.504</b>	<b>53.559.563.433</b>	<b>100,00</b>	<b>99,88</b>	<b>100,00</b>	<b>95,15</b>	<b>2.732.086.071</b>	
5	3.27.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	296.633.227	291.753.727	100,00	100,00	100,00	98,36	4.879.500	
6	3.27.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	188.487.922	179.516.580	100,00	96,94	100,00	95,24	8.971.342	
7	3.27.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	51.668.380.982	49.391.683.011	100,00	99,89	100,00	95,59	570.624.132	

NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERGESERAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	PROSENTASE (%)				SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAHAN / UPAYA PEMECAHANNYA / KETERANGAN LAINNYA
				FISIK		KEUANGAN			
				T	R	T	R		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
8	3.27.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	245.687.540	239.817.210	100,00	100,00	100,00	97,61	5.870.330	
9	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.263.000	13.068.000	100,00	100,00	100,00	67,84	6.195.000	
10	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	212.430.700	178.051.360	100,00	100,00	100,00	83,82	34.379.340	
11	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	67.003.400	63.300.560	100,00	97,60	100,00	94,47	3.702.840	
12	3.27.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.125.000	18.021.750	100,00	100,00	100,00	94,23	1.103.250	
13	3.27.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.008.000	42.495.126	100,00	100,00	100,00	63,42	24.512.874	
14	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	417.000.000	343,321,313	100,00	100,00	100,00	82,33	73.678.687	

NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERGESERAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	PROSENTASE (%)				SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAHAN / UPAYA PEMECAHANNYA / KETERANGAN LAINNYA
				FISIK		KEUANGAN			
				T	R	T	R		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
15	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	341.687.236	341.176.411	100,00	100,00	100,00	99,85	510.825	
16	3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.944.486.888	1.665.328.388	100,00	100,00	100,00	85,64	279.158.500	
17	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	593.655.609	586.255.599	100,00	99,70	100,00	98,75	7.400.010	
18	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	210.800.000	205.774.398	100,00	100,00	100,00	97,62	5.025.602	
<b>SDP</b>		<b>16.276.538.625</b>	<b>16.138.159.181</b>	<b>100,00</b>	<b>99,25</b>	<b>100,00</b>	<b>99,15</b>	<b>138.379.444</b>	
19	3.27.02.1.01.0001 Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	15.137.996.310	15.113.591.956	100,00	99,92	100,00	99,84	24.404.354	-

NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERGESERAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	PROSENTASE (%)				SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAHAN / UPAYA PEMECAHANNYA / KETERANGAN LAINNYA
				FISIK		KEUANGAN			
				T	R	T	R		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
20	3.27.03.1.01.0009 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1.010.261.800	910.107.950	100,00	90,54	100,00	90,09	100.153.850	Tidak bisa di cairkan. Pengadaan ini bukan pengadaan konstruksi murni. pengadaan dapat dilakukan hanya melalui akun PPK melalui e.catalog. karena nilainya sudah melebihi 200jt jadi belanja jasa ini ditiadakan
21	3.27.07.1.02.0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	71.280.515	70.759.275	100,00	100,00	100,00	99,27	521.240	
22	3.27.07.1.01.0004 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	57.000.000	43.700.000	100,00	76,67	100,00	76,67	13.300.000	Ada beberapa orang orangnya pensiun dan ada pindah jabatan
<b>TPH</b>		<b>3.925.951.568</b>	<b>3.259.323.277</b>	<b>100,00</b>	<b>93,22</b>	<b>100,00</b>	<b>83,02</b>	<b>666.628.291</b>	

NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERGESERAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	PROSENTASE (%)				SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAHAN / UPAYA PEMECAHANNYA / KETERANGAN LAINNYA
				FISIK		KEUANGAN			
				T	R	T	R		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
23	3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	3.925.951.568	3.259.323.277	100,00	93,22	100,00	83,02	666.628.291	Bantuan benih jagung tidak mendapatkan penerima 150 Ha dikarenakan banyak kelompok yang sudah menerima bantuan APBN, Untuk bantuan benih padi dan durian terdapat nego harga dengan penyedia
<b>BUN</b>		<b>543.948.422</b>	<b>542.709.977</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,77</b>	<b>1.238.445</b>	
24	3.27.03.1.01.0001 Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	543.948.422	542.709.977	100,00	100,00	100,00	99,77	1.238.445	
<b>PKH</b>		<b>20.991.091.177</b>	<b>18.433.084.541</b>	<b>100,00</b>	<b>87,32</b>	<b>100,00</b>	<b>87,81</b>	<b>2.558.006.636</b>	
25	3.27.02.1.04.0001 Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	12.043.454.132	11.985.602.212	100,00	99,56	100,00	99,52	57.851.920	

NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERGESERAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	PROSENTASE (%)				SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAHAN / UPAYA PEMECAHANNYA / KETERANGAN LAINNYA
				FISIK		KEUANGAN			
				T	R	T	R		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
26	3.27.04.1.01.0007 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	8.882.272.553	6.384.894.922	100,00	70,63	100,00	71,88	2.497.377.631	
27	3.27.04.1.05.0002 Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannya	65.364.492	62.587.407	100,00	100,00	100,00	95,75	2.777.085	
<b>BSMKP</b>		<b>1.356.145.250</b>	<b>1.234.028.312</b>	<b>100,00</b>	<b>92,58</b>	<b>100,00</b>	<b>91,00</b>	<b>122.116.938</b>	
28	2.09.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.927.800	3.901.000	100,00	100,00	100,00	99,32	26.800	
29	2.09.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.702.360	26.950.209	100,00	98,15	100,00	85,01	4.752.151	
30	2.09.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000	31.904.000	100,00	100,00	100,00	98,17	596.000	

NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERGESERAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	PROSENTASE (%)				SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAHAN / UPAYA PEMECAHANNYA / KETERANGAN LAINNYA
				FISIK		KEUANGAN			
				T	R	T	R		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
31	2.09.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	127.230.000	125.188.795	100,00	100,00	100,00	98,40	2.041.205	
32	2.09.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	124.254.476	124.131.476	100,00	100,00	100,00	99,90	123.000	
33	2.09.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	185.930.984	173.129.684	100,00	100,00	100,00	93,12	12.801.300	
34	2.09.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.132.984	80.132.984	100,00	100,00	100,00	94,13	5.000.000	
35	2.09.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.060.000	39.513.500	100,00	100,00	100,00	93,95	2,546,500	

NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERGESERAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	PROSENTASE (%)				SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAHAN / UPAYA PEMECAHANNYA / KETERANGAN LAINNYA
				FISIK		KEUANGAN			
				T	R	T	R		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
36	2.09.05.1.01.0006 Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	246.234.104	200.332.494	100,00	100,00	100,00	81,36	45,901,610	
37	2.09.05.1.01.0008 Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	112.621.702	94.580.880	100,00	100,00	100,00	8398	18,040,822	
38	3.27.04.1.03.0001 Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	150.623.335	136.007.020	100,00	100,00	100,00	90.30	14,616,315	
39	3.27.04.1.03.0003 Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	213.927.505	198.256.270	100,00	99,30	100,00	92,67	15.671.235	
<b>BPSBTPH BUN</b>		<b>836.234.367</b>	<b>724,204,184</b>	<b>100,00</b>	<b>98,34</b>	<b>100,00</b>	<b>86,60</b>	<b>112.030.183</b>	
40	3.27.0 1.1.0 60001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kanto	3.197.300	2.364.000	100,00	100,00	100,00	73,94	833.300	

NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERGESERAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	PROSENTASE (%)				SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAHAN / UPAYA PEMECAHANNYA / KETERANGAN LAINNYA
				FISIK		KEUANGAN			
				T	R	T	R		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
41	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.269.200	5.296.444	100,00	100,00	100,00	72,86	1.972.756	
42	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000	32.400.000	100,00	100,00	100,00	99,69	100.000	
43	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.109.000	70.697.325	100,00	100,00	100,00	52,33	64.411.675	
44	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	85.096.184	84.644.984	100,00	100,00	100,00	99,47	451.200	
45	3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	133.666.492	123.109.292	100,00	100,00	100,00	92,10	10.557.200	
46	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	19.950.000	19.000.000	100,00	100,00	100,00	95,24	950.000	

NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERGESERAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	PROSENTASE (%)				SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAHAN / UPAYA PEMECAHANNYA / KETERANGAN LAINNYA
				FISIK		KEUANGAN			
				T	R	T	R		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
47	3.27.0 1.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.850.000	11.072.850	100,00	100,00	100,00	93,44	777.150	
48	3.27.02.1.02.0001 Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	197.683.732	197.064.972	100,00	93,00	100,00	99,69	618.760	
49	3.27.02.1.02.0005 Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	209.912.459	178.554.317	100,00	99,97	100,00	85,06	31.358.142	
<b>BPTPH BUN</b>		<b>1.988.513.777</b>	<b>1.811.554.857</b>	<b>100,00</b>	<b>95.52</b>	<b>100,00</b>	<b>91.10</b>	<b>176.958.920</b>	
50	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	599.900	531.500	100,00	100,00	100,00	88,60	68.400	
51	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.056.000	3.919.520	100,00	100,00	100,00	77,52	1.136.480	
52	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000	49.600.000	100,00	100,00	100,00	99,20	400.000	

NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERGESERAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	PROSENTASE (%)				SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAHAN / UPAYA PEMECAHANNYA / KETERANGAN LAINNYA
				FISIK		KEUANGAN			
				T	R	T	R		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
53	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	220.520.000	168.269.006	100,00	100,00	100,00	76,31	52.250.994	
54	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	204.364.660	204.160.960	100,00	100,00	100,00	99,90	203.700	
55	3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	245.299.476	229.706.376	100,00	100,00	100,00	93,64	15.593.100	
56	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	408.887.215	398.461.592	100,00	100,00	100,00	97,45	10.425.623	
57	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.200.000	4.975.000	100,00	100,00	100,00	95,67	225.000	

NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERGESERAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	PROSENTASE (%)				SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAHAN / UPAYA PEMECAHANNYA / KETERANGAN LAINNYA
				FISIK		KEUANGAN			
				T	R	T	R		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
58	3.27.05.1.01.0001 Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	342.943.450	327.311.904	100,00	95,21	100,00	95,44	15.631.546	
59	3.27.05.1.01.000 2 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	285.383.657	242.466.315	100,00	85,96	100,00	84,96	42.917.342	
60	3.27.05.1.01.0005 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	220.259.419	182.152.684	100,00	85,22	100,00	82,70	38.106.735	
<b>BIBD</b>		<b>2.908.218.025</b>	<b>2.591.168.272</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>89,10</b>	<b>317.049.753</b>	
61	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.095.200	5.756.000	100,00	100,00	100,00	94,43	339.200	
62	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.126.500	7.075.440	100,00	100,00	100,00	63,59	4.051.060	

NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERGESERAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	PROSENTASE (%)				SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAHAN / UPAYA PEMECAHANNYA / KETERANGAN LAINNYA
				FISIK		KEUANGAN			
				T	R	T	R		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
63	3.27.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.500.000	31.665.800	100,00	100,00	100,00	97,43	834.200	
64	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.000.000	41.657.841	100,00	100,00	100,00	63,12	24.342.159	
65	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	289.015.144	288.861.944	100,00	100,00	100,00	99,95	153.200	
66	3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	265.015.968	255.973.868	100,00	100,00	100,00	96,59	9.042.100	
67	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	282.454.362	281.796.546	100,00	100,00	100,00	99,77	657.816	
68	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.870.000	3.950.000	100,00	100,00	100,00	81,11	920.000	

NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERGESERAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	PROSENTASE (%)				SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAHAN / UPAYA PEMECAHANNYA / KETERANGAN LAINNYA
				FISIK		KEUANGAN			
				T	R	T	R		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
69	3.27.02.1.04.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1.951.140.851	1.674.430.833	100,00	100,00	100,00	85,82	276.710.018	
<b>BBITPHBUN</b>		<b>2.449.832.794</b>	<b>2.327.724.384</b>	<b>100,00</b>	<b>99,48</b>	<b>100,00</b>	<b>95,02</b>	<b>122.108.410</b>	
70	3.27.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.996.900	1.684.000	100,00	100,00	100,00	84,33	312.900	
71	3.27.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.998.100	4.968.365	100,00	100,00	100,00	82,83	1.029.735	
72	3.27.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000	30.752.000	100,00	100,00	100,00	87,86	4.248.000	
73	3.27.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	117.912.191	81.984.951	100,00	100,00	100,00	69,53	35.927.240	
74	3.27.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	121.021.476	120.883.476	100,00	100,00	100,00	99,89	138.000	

NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERGESERAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	PROSENTASE (%)				SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAHAN / UPAYA PEMECAHANNYA / KETERANGAN LAINNYA
				FISIK		KEUANGAN			
				T	R	T	R		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
75	3.27.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	92.081.492	87.627.292	100,00	100,00	100,00	95,16	4.454.200	
76	3.27.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	42.566.492	42.531.892	100,00	100,00	100,00	99,92	34.600	
77	3.27.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.920.000	2.700.000	100,00	100,00	100,00	92,47	220.000	
78	3.27.02.1.02.0007 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	584.166.955	559.554.000	100,00	100,00	100,00	95,79	24.612.955	
79	3.27.02.1.02.0011 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	703.243.365	687.513.555	100,00	99,22	100,00	97,76	15.729.810	

NO	SUB KEGIATAN	RENCANA BIAYA 1 TAHUN SETELAH PERGESERAN (Rp.)	REALISASI DANA (Rp.)	PROSENTASE (%)				SISA ANGGARAN (Rp.)	PERMASALAHAN / UPAYA PEMECAHANNYA / KETERANGAN LAINNYA
				FISIK		KEUANGAN			
				T	R	T	R		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
80	3.27.02.1.02.0013 Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	373.483.732	361.384.713	100,00	100,00	100,00	96,76	12.099.019	
81	3.27.02.1.02.0014 Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	322.247.891	300.031.940	100,00	100,00	100,00	93,11	22.215.951	
82	3.27.02.1.03.0004 Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	47.194.200	46.108.200	100,00	84,74	100,00	97,70	1.086.000	
<b>TOTAL</b>		<b>110.402.603.708</b>	<b>103.297.598.505</b>	<b>100,00</b>	<b>96,95</b>	<b>100,00</b>	<b>93,56</b>	<b>7.105.005.203</b>	

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025

Tabel 26 : Realisasi Fisik dan Keuangan Dana APBN Tahun 2025

**REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DANA APBN TAHUN 2025**

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	PROGRAM	KEGIATAN	KRO	PAGU	REALISASI					SISA DANA (Rp)
							FISIK		KEUANGAN			
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	229102	Satker Peternakan dan Kesehatan Hewan				1.055.261.000	100,00%	100,00%	1.055.261.000	985.257.447	93,37%	70.003.553
		229102 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1784 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	QAH Pelayanan Publik Lainnya (Layanan, Bidang, Dokumen, Miliar, Rp, Titik)	913.470.000	100,00%	100,00%	913.470.000	909.638.670	99,58%	3.831.330
			WA Program Dukungan Manajemen	1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumentasi, Rekomendasi, Unit)	36.701.000	100,00%	100,00%	36.701.000	10.906.105	29,72%	25.794.895
			WA Program Dukungan Manajemen	1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	105.090.000	100,00%	100,00%	105.090.000	64.712.672	61,58%	40.377.328

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	PROGRAM	KEGIATAN	KRO	PAGU	REALISASI					SISA DANA (Rp)
							FISIK		KEUANGAN			
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	229099	Satker Tanaman Pangan				205.440.000	100,00%	100,00%	205.440.000	203.555.969	99,08%	1.884.031
		229099 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	HA Program Ketersediaan Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1762 Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal/Tanaman Pangan	AEA Koordinasi (Kegiatan)	28.000.000	100,00%	100,00%	28.000.000	26.724.831	95,45%	1.275.169
			WA Program Dukungan Manajemen	1766 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal [Output Baru - Perubahan Kebijakan] (Layanan, Laporan, Dokumentasi, Rekomendasi, Unit)	126.450.000	100,00%	100,00%	126.450.000	126.403.365	99,96%	46,63
			WA Program Dukungan Manajemen	1766 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	50.990.000	100,00%	100,00%	50.990.000	50.427.773	98,90%	562,227
5	229108	Satker PSP				1.479.270.000	100,00%	100,00%	1.479.270.000	1.349.738.022	91,24%	129.531.978
		229108 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	1796 Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (Unit)	165.000.000	100,00%	100,00%	165.000.000	161.721.059	98,01%	3.278.941

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	PROGRAM	KEGIATAN	KRO	PAGU	REALISASI					SISA DANA (Rp)
							FISIK		KEUANGAN			
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	3993 Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	QAA Pelayanan Publik Kepada Masyarakat (Orang, Akta, Keping, Bidang)	714.270.000	100,00%	100,00%	714.270.000	669.941.945	93,79%	44.328.055
			WA Program Dukungan Manajemen	1797 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	600.000.000	100,00%	100,00%	600.000.000	518.075.018	86,35%	81.924.982
<b>JUMLAH DANA TP</b>						<b>2.739.971.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.739.971.000</b>	<b>2.538.551.438</b>	<b>92,65%</b>	<b>201.419.562</b>
<b>1</b>	<b>229067</b>	<b>Satker Tanaman Pangan</b>				<b>79.310.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>79.310.000</b>	<b>77.051.824</b>	<b>97,15%</b>	<b>2.258.176</b>
		229067 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	4579 Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan	PDC Sertifikasi Produk (Produk, Sertifikat)	44.310.000	100,00%	100,00%	44.310.000	42.737.619	96,45%	1.572.381
			WA Program Dukungan Manajemen	1766 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	35.000.000	100,00%	100,00%	35.000.000	34.314.205	98,04%	685.795
<b>4</b>	<b>229029</b>	<b>Satker PSP</b>				<b>150.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>150.000.000</b>	<b>37.937.105</b>	<b>25,29%</b>	<b>112.062.895</b>
		229029 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	WA Program Dukungan Manajemen	1797 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	150.000.000	100,00%	100,00%	150.000.000	37.937.105	25,29%	112.062.895
<b>5</b>	<b>229030</b>	<b>Satker SDM</b>				<b>139.334.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>139.334.000</b>	<b>137.983.780</b>	<b>99,03%</b>	<b>1.350.220</b>

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	PROGRAM	KEGIATAN	KRO	PAGU	REALISASI					SISA DANA (Rp)
							FISIK		KEUANGAN			
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		229030 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	DL Program Pendidikan dan Pelatihan vokasi	1812 Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian	FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	139.334.000	100,00%	100,00%	139.334.000	137.983.780	99,03%	1.350.220
<b>6</b>	<b>690720</b>	<b>Satker Ketahanan Pangan</b>				<b>1.631.383.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.631.383.000</b>	<b>386.004.109</b>	<b>23,66%</b>	<b>1.245.378.891</b>
		690720 DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	6875 Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	AEA koordinasi (Kegiatan)	135.254.000	100,00%	100,00%	135.254.000	0	0,00%	135.254.000
			HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	6875 Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan (Rekomendasi, Kebijakan, Kajian)	121.415.000	100,00%	100,00%	121.415.000	0	0,00%	121.415.000
			HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	6875 Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (Kelompok Masyarakat)	214.400.000	100,00%	100,00%	214.400.000	125.802.049	58,68%	88.597.951
			HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	6875 Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	QMA Data dan Informasi Publik (Layanan, Dokuman, Publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	68.400.000	100,00%	100,00%	68.400.000	0	0,00%	68.400.000

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	PROGRAM	KEGIATAN	KRO	PAGU	REALISASI					SISA DANA (Rp)
							FISIK		KEUANGAN			
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	6876 Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	AEA koordinasi (Kegiatan)	80.000.000	100,00%	100,00%	80.000.000	58.956.670	73,70%	21.043.330
			HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	6876 Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	PBR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan (Rekomendasi, Kebijakan, Kajian)	50.000.000	100,00%	100,00%	50.000.000	29.486.956	58,97%	20.513.044
			HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	6877 Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	PCA Perizinan Produk (Produk, Keputusan)	150.000.000	100,00%	100,00%	150.000.000	49.393.725	32,93%	100.606.275
			HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	6877 Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	PEH Promosi (Promosi, Kegiatan)	180.000.000	100,00%	100,00%	180.000.000	0	0,00%	180.000.000
			HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	6877 Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	QDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga (Lembaga, Unit, Kerja, Tim)	151.000.000	100,00%	100,00%	151.000.000	26.957.122	17,85%	124.042.878

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	PROGRAM	KEGIATAN	KRO	PAGU	REALISASI					SISA DANA (Rp)
							FISIK		KEUANGAN			
							TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	6877 Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (Kelompok Masyarakat)	333.950.000	100,00%	100,00%	333.950.000	0	0,00%	333.950.000
			HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	6877 Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk (Produk, Laporan, Keputusan)	100.000.000	100,00%	100,00%	100.000.000	48.638.400	48,64%	51.361.600
			WA Program Dukungan Manajemen	6874 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	FBA Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	46.964.000	100,00%	100,00%	46.964.000	46.769.187	99,59%	194.813
<b>JUMLAH DANA DK</b>						<b>2.000.027.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.000.027.000</b>	<b>638.976.818</b>	<b>31,95%</b>	<b>1.361.050.182</b>
<b>JUMLAH DANA TP DAN DK</b>						<b>4.739.998.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.739.998.000</b>	<b>3.177528.256</b>	<b>67,04%</b>	<b>1.562.469.744</b>

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025

### 3.3 Keberhasilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pada Tahun 2025

Pada tahun 2025 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali mendapat beberapa penghargaan sebagai prestasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan nilai tambah serta daya saing pertanian. Adapun penghargaan selama tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 27 : Prestasi/Penghargaan Tahun 2025

<b>NO</b>	<b>PRESTASI / PENGHARGAAN YANG DITERIMA</b>	<b>INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN</b>
1	Provinsi dengan Capaian Angka Prevalence of Undernourishment (PoU) terbaik III Tahun 2024 (Angka PoU 3,20%)	Badan Pangan Nasional
2	Kementerian dan Lembaga Berkinerja Penggunaan KKP Terbaik Semester I 2025 Katagori Pagu Sedang	Kementerian Pertanian
3	Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Klasifikasi Baik Tahun 2024	Badan Pangan Nasional

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun 2025

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Sesuai uraian pada BAB III tentang Akuntabilitas Kinerja dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 dan sesuai dengan target akhir renstra adalah sebagai berikut :

1. Realisasi indikator kinerja yang di perjanjikan pada dokumen Perjanjian Kinerja telah melebihi dari target yang telah ditetapkan dari 2 indikator tersebut, pada indikator Persentase ketersediaan pangan strategis realisasi kinerja adalah 245.39% dengan capaian kinerja 245,39% dan pada indikator Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB dengan realisasi kinerja 13,02% dan capaian kinerja 122,48%, hal ini disebabkan oleh meningkatnya ketersediaan pangan utama yang didukung oleh meningkatnya produksi dan produktivitas disektor pertanian tanaman pangan, hortikultura dan meningkatnya populasi ternak, peningkatan kontribusi PDRB terhadap sektor pertanian di sebabkan oleh meningkatnya nilai ekspor produk – produk pertanian terutama komoditi perkebunan.
2. Realisasi Belanja APBD dengan pagu anggaran Rp 110.402.603.708,- dengan realisasi anggaran Rp 103.297.598.505 (93,56%).
3. Realisasi keuangan dana Dekonsentrasi (DK) dengan pagu anggaran Rp 2.000.027.000,- realisasi keuangan Rp 638.976.818 (31,95%) dan kegiatan fisiknya mencapai 100,00%.
4. Kegiatan Tugas Pembantuan (TP) dengan pagu anggaran Rp 2.739.971.000,- realisasi keuangan Rp 2.538.551.438,- (92,64%) dengan realisasi fisik 100,00%.

Perkembangan selama lima tahun terakhir produksi padi, palawija dan hortikultura di Bali masih sangat berfluktuasi selain karena

faktor iklim yang tidak menentu dan juga akibat serangan OPT. Walaupun produksi pangan masih relatif konstan tetapi Bali masih mampu memberikan tingkat penyediaan pangan yang cukup untuk penduduk dengan berbagai program yang dapat meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pangan.

## **4.2 PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT**

### **A. Permasalahan**

Secara umum beberapa permasalahan yang masih dihadapi sampai saat ini dalam rangka pembangunan pertanian antara lain sebagai berikut :

- a) Adanya Alih Fungsi Lahan dan pemilikan lahan sempit
- b) Keterbatasan Air
- c) Penguasaan teknologi bagi petani lemah
- d) Adanya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
- e) Akses Pemasaran Dan Permodalan Petani Lemah
- f) Mutu produksi masih rendah

### **B. Upaya Tindak Lanjut**

- a) Pengembangan teknologi hemat air, pembuatan embung, cabang, perbaikan jaringan irigasi dan lain - lain.
- b) Dilaksanakannya pelatihan / kursus bagi petani, serta peningkatan koordinasi penyuluhan sampai ke tingkat BPP.
- c) Pengendalian OPT baik secara kimia, fisik dan biologis serta pemantapan program SL-PHT
- d) Penyaluran dana LUEP, serta meminimalisasi persyaratan kredit KKP seperti agunan Bank
- e) Pembinaan pasca panen, pengembangan pengolahan hasil pertanian, temu usaha kemitraan dan pengembangan STA (Sub Terminal Agribisnis).

# LAMPIRAN



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Wayan Sunada

Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : S. M. MAHENDRA JAYA

Jabatan : Pj. Gubernur Bali

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bali, 02 Januari 2025

**Pihak Pertama**

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali,

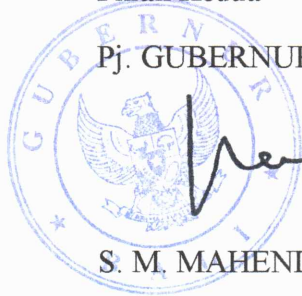


I Wayan Sunada

NIP. 19671231 198703 1 056

**Pihak Kedua**

Pj. GUBERNUR BALI,



S. M. MAHENDRA JAYA

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**(KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI)**

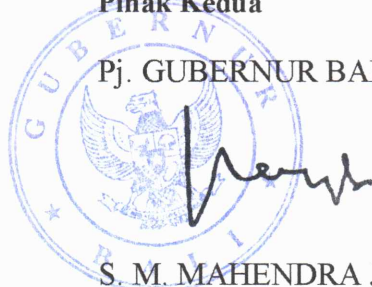
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan strategis	Persentase ketersediaan pangan strategis	100%
2	Meningkatnya sektor pertanian terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	10,63%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 67.780.032.351	APBD
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Rp. 493.326.192	APBD
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 512.815.610	APBD
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 607.358.002	APBD
5	Program penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 14.937.925.066	APBD
6	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp. 1.130.808.892	APBD
7	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 10.400.607.072	APBD
8	Program Pengendalian Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 1.251.181.194	APBD
9	Program Penyuluhan Pertanian	Rp. 133.073.630	APBD

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
10	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen (02)	Rp. 141.791.000	APBN
11	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen (04)	Rp. 591.392.000	APBN
12	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen (08)	Rp. 1.629.270.000	APBN
13	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (010)	Rp. 141.000.000	APBN
14	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen (69)	Rp. 1.584.419.000	APBN

**Pihak Kedua**

Pj. GUBERNUR BALI,



S. M. MAHENDRA JAYA

**Pihak Pertama**

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali,



I Wayan Sunada

NIP. 19671231 198703 1 056

## Prestasi/Penghargaan Tahun 2025



Provinsi dengan Capaian Angka Prevalence of Undernourishment (PoU) terbaik III Tahun 2024 (Angka PoU 3,20%)



Penggunaan KKP Terbaik Semester I 2025 Katagori Pagu Sedang



Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Klasifikasi Baik Tahun 2024